

**ANALISIS KEBIJAKAN KONVERSI MINYAK TANAH KE LPG
(LIQUEFIED PETROLIUM GAS) DI DESA BUATAN BARU
KECAMATAN KERINCI KANAN KABUPATEN
SIAK DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

S K R I P S I

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)**



**ZUNIARTI
NIM. 10825002674**

**PROGRAM S1
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2012**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: “**Analisis Kebijakan *Konversi* Minyak Tanah Ke LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) Di Desa Buatan Baru Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam**”.

Konversi minyak tanah ke LPG merupakan kebijakan yang telah lama dicanangkan oleh pemerintah. Namun pada kenyataannya kebijakan itu hingga saat ini belum sepenuhnya berhasil. Masih banyak warga masyarakat yang masih bertahan dengan minyak tanah sekalipun LPG sudah disosialisasikan oleh pemerintah setempat. Desa Buatan Baru Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak merupakan salah satu dari sekian banyak desa yang masyarakatnya ada yang telah ber*konversi* namun juga tidak sedikit yang masih bertahan menggunakan minyak tanah.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan masyarakat Desa Buatan Baru terhadap kebijakan *konversi* minyak tanah ke LPG, bagaimana upaya pemerintah terkait sosialisasi *konversi* tersebut, serta bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap kebijakan *konversi* minyak tanah ke LPG.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field riset*) yang berlokasi di Desa Buatan Baru Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Adapun yang menjadi populasi dan sampel adalah warga desa Buatan Baru yang berjumlah 520 kepala keluarga dan diambil sampel sebanyak 10% menggunakan teknik *random sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 52 orang, serta perangkat desa yang diambil 5 orang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif kualitatif* dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi, angket dan wawancara.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Desa Buatan Baru terhadap *konversi* minyak tanah ke LPG sudah baik. Kebijakan ini juga berdampak positif bagi kehidupan masyarakat, karena bisa menghemat pengeluaran dan kehidupan masyarakat menjadi lebih mudah karena penggunaan LPG lebih *efektif* dan lebih mudah

ditemui saat ini. Akan tetapi masyarakat masih merasa takut dan khawatir apabila terjadi ledakan tabung gas. Upaya pemerintah dalam hal sosialisasi *konversi* minyak tanah ke LPG juga telah dilakukan, namun masih belum maksimal karena masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami arti penting *konversi* dan belum memahami cara pemakaian LPG dan cara penanggulangan apabila terjadi resiko. Dengan demikian masih diperlukan adanya sosialisasi lanjutan.

Tinjauan ekonomi Islam terhadap kebijakan *konversi* minyak tanah ke LPG tidak bertentangan dan telah sesuai dengan kaidah hukum Islam, karena kebijakan ini bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat dan menghemat APBN, selain itu kebijakan ini berdampak positif bagi kehidupan masyarakat. Akan tetapi dari segi sosialisasinya masih belum maksimal sesuai dengan prinsip Islam yang meliputi kejujuran, transparansi, responsif terhadap aspirasi rakyat dan suri tauladan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

NOTA PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Metode penelitian	9
F. Sistematika penulisan	13
BAB II GAMBARAN UMUM DESA BUATAN BARU.....	14
A. Kondisi Geografis	14
B. Gambaran Umum Demografis	15
C. Visi dan Misi Desa Buatan Baru	16
D. Pendidikan	16
E. Agama	17
F. Sosial Ekonomi Masyarakat	19
G. Adat Istiadat dan Budaya	21
BAB III TINJAUAN UMUM KEBIJAKAN..	22
A. Pengertian Kebijakan	22
B. Kebijakan Publik	24
C. Kebijakan Ekonomi	26
D. Landasan Pengambilan Kebijakan	29
E. Sistem-Sistem Perekonomian	33

F. Kebijakan Ekonomi Dalam Islam	39
BAB IV HASIL PENELITIAN	41
A. Pandangan Masyarakat Desa Buatan Baru Terhadap Kebijakan <i>Konversi</i> Minyak Tanah ke LPG	41
B. Upaya Pemerintah dalam Sosialisasi Konversi Minyak Tanah ke LPG	48
C. Tinjauan Ekonomi Islam	57
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	15
Tabel II.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	16
Tabel II.3	Jumlah sarana pendidikan	17
Tabel II.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	18
Tabel II.5	Jumlah Sarana Ibadah	19
Tabel II.6	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	20
Tabel IV.1	Jawaban Responden Tentang Apakah Anda Setuju Dengan Program <i>Konversi</i> Minyak Tanah ke Gas LPG	42
Tabel IV.2	Jawaban Responden Tentang Apakah Anda Memakai Gas LPG Untuk Memasak Di Rumah	43
Tabel IV.3	Jawaban Responden Tentang Apakah Menurut Anda Gas LPG Aman Digunakan	43
Tabel IV.4	Jawaban Responden Tentang Apakah Anda Khawatir Dengan Merebaknya Berita Tentang Meledaknya Tabung Gas LPG	44
Tabel IV.5	Jawaban Responden Tentang Apakah Anda Lebih Senang Memakai Minyak Tanah Dibandingkan Gas LPG	45
Tabel IV.6	Jawaban Responden Tentang Apakah Pemakaian Gas LPG <i>Efisien</i> Menurut Anda	46
Tabel IV.7	Jawaban Responden Tentang Bagaimana Dampak Pemakaian LPG Terhadap Pengeluaran Anda	46
Tabel IV.8	Jawaban Responden Tentang Bagaimana Dampak <i>Konversi</i> Minyak Tanah ke LPG Terhadap Kehidupan Anda	47
Tabel IV.9	Jawaban Responden Tentang Bagaimana Pendapat Anda Terhadap Sosialisasi Yang Telah Dilakukan Oleh Pemerintah Setempat	49
Tabel IV.10	Jawaban Responden Tentang Apa Saja Bentuk Sosialisasi Yang Telah Dilakukan Oleh Pemerintah Setempat	49

Tabel IV.11	Jawaban Responden Tentang Apakah Ada Kesulitan Dalam Pemakaian Gas LPG	50
Tabel IV.12	Jawaban Responden Tentang Apakah Ada Kunjungan atau Penjelasan Langsung dari Pihak Pertamina	51
Tabel IV.13	Jawaban Responden Tentang Dari Mana Anda Mendapat Penjelasan Tentang LPG	52
Tabel IV.14	Jawaban Responden Tentang Apa Saja Media Informasi yang Anda Dapatkan Tentang LPG	52
Tabel IV.15	Jawaban Responden Tentang Apakah Anda Memaham Secara Jelas Penggunaan LPG	53
Tabel IV.16	Jawaban Responden Tentang Apakah Anda Memahami Resiko-resiko yang Mungkin Terjadi Dalam Penggunaan LPG	53
Tabel IV.17	Jawaban Responden Tentang Apakah Anda Memahami Cara Penanggulangan Apabila Terjadi Resiko Dalam Penggunaan LPG	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia merupakan salah satu masyarakat dunia yang memiliki ketergantungan terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) sangat tinggi. Baik itu untuk keperluan rumah tangga, transportasi maupun industri. Sehingga wajar bila pemerintah berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya yang bersifat primer ini dengan memberikan subsidi terhadap pembelian BBM. Akan tetapi, harga minyak dunia terus meningkat, sehingga subsidi untuk minyak tanah pun meningkat. Untuk menghemat APBN, minyak tanah pun *dikonversi* dengan gas LPG, dimana kebijakan tersebut melahirkan kebijakan lain, yaitu pembagian tabung gas dan kompor secara gratis untuk mempercepat *konversi* minyak tanah menjadi gas.¹

Adapun dasar hukum pelaksanaan kebijakan *konversi* minyak tanah menjadi gas antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara, dan 3) Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

¹ <http://tutorjunior.blogspot.com/2009/10/kontroversi-pembagian-tabunggas.html>. akses tanggal 28 desember 2011.

2. Surat Menteri ESDM, No.3249/ 26/ MEM/ 2006, tanggal 31 Agustus 2006, perihal hasil rapat Koordinasi Terbatas yang dipimpin oleh Wakil Presiden mengenai *diversifikasi* minyak tanah ke LPG, dalam hal ini Pertamina di tunjuk untuk melaksanakan *Konversi* Minyak tanah ke LPG bagi Konsumen rumah tangga,
3. Surat Wakil Presiden RI No.20/ WP/ 9/2006 tanggal 1 September 2006, perihal *Konversi* Pemakaian minyak tanah ke LPG.
4. Peluncuran pelaksanaan *konversi* minyak tanah ke LPG 3 kg oleh Wapres tanggal 08 Mei 2007 Jam 14.00 Wib di Kampung Makasar, Jakarta Timur.²

Kebijakan pembagian tabung gas dan kompor ini tidak terlepas dari kebijakan *konversi* minyak tanah menjadi gas yang dilatarbelakangi oleh:

1. Harga minyak dunia meningkat, sehingga subsidi minyak tanah meningkat.
2. Ditaksir menghemat APBN hingga 17,5 trilyun rupiah.
3. Gas alam di Indonesia melimpah.
4. Gas alam yang dinilai lebih ramah lingkungan dari minyak tanah.³

Kebijakan adalah sebuah metode atau rangkaian tindakan yang dipakai oleh manajemen untuk menuntun secara rutin pengambilan keputusan masa depan. Kebijakan merupakan sebuah mekanisme pembuat keputusan yang otomatis dalam situasi tertentu. Artinya, sekali keputusan itu telah ditetapkan

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

untuk dilaksanakan dalam situasi tertentu, keputusan itu lalu menjadi kebijakan yang harus diikuti setiap kali situasi yang sama muncul kembali.⁴

Kebijakan publik bukan hanya menyangkut kepentingan individu atau kelompok tertentu, tetapi lebih terkait dengan tujuan bersama, kepentingan umum, atau kepentingan khalayak. Rencana tindakan yang disebut kebijakan itu selanjutnya dilaksanakan dengan berbagai keputusan dan tindakan. Kebijakan publik juga dapat dirumuskan secara mudah sebagai sejumlah aktivitas pemerintah, apakah secara langsung atau melalui instansi tertentu, yang berpengaruh terhadap kehidupan warga negara.⁵

Kebijakan negara dalam bidang perekonomian secara tersurat telah jelas tercantum dalam rujukan klasik ekonomi Islam, yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Kebijakan ekonomi tidak lepas dari sifat dan bentuk sistem ekonomi Islam yang terpadu (*integratif*) dan menyeluruh (*comprehensif*). Rangkaian kebijakan ekonomi Islam menggambarkan secara jelas sifat terpadu dan menyeluruh tadi, yang merefleksikan karakteristik, mekanisme, *regulasi* dan tujuan ekonomi Islam.⁶

Sebenarnya kebijakan fiskal telah sejak lama dikenal dalam teori ekonomi Islam, yaitu sejak zaman Rasulullah dan *Khulafaur Rasyidin*, dan kemudian dikembangkan oleh para ulama. Abu yusuf (798) adalah ekonom pertama yang menulis secara khusus tentang kebijakan ekonomi dalam kitabnya, *al-Kharaj*,

⁴ William J Stanton, *Prinsip Pemasaran* (Jakarta: Erlangga, 1984), Edisi ke-7, Jilid ke-1, h.42.

⁵ Wahyudi Kumorotomo, *Desentralisasi Fiskal*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.23.

⁶ Akhmad Mujahidin, *Buku Ajar Ekonomi Islam II*, (Pekanbaru: Suska Press, 2010), h.107-108.

yang menjelaskan tanggung jawab ekonomi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Abu yusuf sangat menentang adanya pajak atas tanah pertanian dan menyarankan diganti dengan zakat pertanian yang dikaitkan dengan jumlah panennya. Abu yusuf membuat rincian bagaimana membiayai pembangunan jembatan, bendungan, dan *irigasi*.⁷

Ekonomi Islam sangat menganjurkan dilaksanakannya aktivitas produksi dan mengembangkannya, baik segi kuantitas maupun kualitas. Ekonomi Islam tidak rela jika tenaga manusia atau *komoditi* terlantar begitu saja. Islam menghendaki semua tenaga dikerahkan untuk meningkatkan produktivitas lewat *itqan* (ketentuan) yang diridhai oleh Allah atau *ihsan* yang diwajibkan Allah atas segala sesuatu.⁸

Tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam yaitu *tauhid* dan berdasarkan rujukan kepada al-Qur'an dan Sunnah adalah:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
2. Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang.
3. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat.
4. Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral.

⁷ Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.25.

⁸ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), h.123-124.

5. Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.⁹

Empat nilai utama yang bisa ditarik dari ekonomi Islam adalah:

1. Peranan positif negara, sebagai *regulator* yang mampu memastikan kegiatan ekonomi berjalan dengan baik sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan orang lain.
2. Batasan moral atas kebebasan yang dimiliki, sehingga setiap individu dalam melakukan aktivitasnya akan mampu pula memikirkan dampaknya bagi orang lain.
3. Kesetaraan kewajiban dan hak, hal ini mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.
4. Usaha untuk selalu bermusyawarah dan bekerja sama, sebab hal ini menjadi salah satu fokus utama ekonomi Islam.¹⁰

LPG merupakan gas *hidrokarbon* yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas *Propana* (C3), *Butana* (C4) atau campuran keduanya (Mix LPG).¹¹

LPG diperkenalkan oleh Pertamina pada tahun 1968. Selama ini masih banyak salah pengertian mengenai apa dan dari mana sumber LPG diperoleh. Menurut arti harfiah kata, LPG merupakan singkatan dari *Liquefied Petroleum Gas* yang artinya gas yang dicairkan pada tekanan tertentu yang diperoleh dari

⁹ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.4.

¹⁰ *Ibid*, h.4-5.

¹¹ Pengertian LPG dalam PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

minyak bumi yang telah *difraksionasi*. Sehingga sumber utama penghasil LPG sebenarnya adalah minyak bumi, bukan gas bumi. LPG juga bisa dihasilkan dari gas bumi, namun membutuhkan proses yang lebih rumit untuk mengolahnya menjadi LPG.

Program *konversi* minyak tanah ke gas LPG merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi subsidi BBM, dengan mengalihkan minyak tanah ke LPG. Program ini diimplementasikan dengan membagikan paket tabung LPG beserta isinya, kompor gas dan aksesorinya kepada rumah tangga dan usaha mikro pengguna minyak tanah.¹²

Adapun maksud dan tujuan *konversi* minyak tanah ke LPG yaitu:

- a. Mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak yang cenderung meningkat jumlahnya (terutama pemakaian minyak tanah).
- b. Semakin menipisnya cadangan minyak bumi di Indonesia dan terus melambungnya harga minyak mentah dunia.
- c. Pemakaian LPG terbukti lebih mudah dan hemat, lebih aman dan lebih bersih.¹³

Hal ini pula yang terjadi di masyarakat Desa Buatan Baru Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Disana masih terdapat masyarakat yang bertahan menggunakan kompor minyak tanah. Sekalipun harga minyak tanah melambung tinggi, namun mereka tetap bertahan. Pembagian kompor gas dan tabung gas di Desa Buatan Baru dilakukan pada Oktober 2010. Namun banyak warga yang

¹² <http://www.pertamina.com/konversi/faq.php>, akses tanggal 22 Juni 2012.

¹³ <http://gasdom.pertamina.com/faq.aspx>, akses tanggal 20 Juni 2012.

tidak menggunakannya untuk memasak, warga masih merasa ketakutan untuk menggunakannya, bahkan ada sebagian yang membuang kompor gratis pemberian pemerintah tersebut, ada juga yang memberikannya kepada tetangga atau saudaranya. Hal ini disebabkan mereka takut jikalau sewaktu-waktu tabung gas tersebut akan meledak, karena banyak kejadian meledaknya tabung gas ukuran 3 kg yang diberitakan oleh stasiun televisi.¹⁴ Sangat disayangkan, karena untuk lokasi Desa Buatan Baru bukanlah desa yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Selain itu usaha pemerintah setempat dalam hal sosialisasi juga telah dilakukan.

Dari jumlah total penduduk 2.087, penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat akademik ada 68 orang, dan hampir seluruh masyarakatnya mempunyai pendidikan terakhir SMP dan SMA. Dan rata-rata pekerjaan penduduk disana sekalipun masih mayoritas sebagai petani namun lahan yang mereka kerjakan merupakan lahan milik sendiri. Disana para penduduknya juga banyak yang telah mempunyai usaha wiraswasta.

Dengan demikian masih diperlukan sosialisasi lagi dari pemerintah setempat agar program *konversi* minyak tanah ke LPG bisa terlaksana dengan baik.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS KEBIJAKAN KONVERSI MINYAK TANAH KE LPG (*LIQUEFIED PETROLIUM GAS*) DI DESA BUATAN BARU KECAMATAN KERINCI KANAN KABUPATEN SIAK DITINJAI MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**.

¹⁴ Subakri, (Bendahara Desa Buatan Baru), *Wawancara*, Tanggal 29 Desember 2011.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan batasan pada objek penelitian. Penelitian ini hanya membahas terkait dengan kebijakan pemerintah tentang *konversi* minyak tanah ke LPG, dan yang akan diteliti meliputi pandangan masyarakat, sosialisasi pemerintah dan tinjauan ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap kebijakan *konversi* minyak tanah ke LPG di Desa Buatan Baru Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak?
2. Bagaimana upaya pemerintah terkait sosialisasi *konversi* minyak tanah ke LPG di Desa Buatan Baru Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap kebijakan *konversi* minyak tanah ke LPG?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap kebijakan *konversi* minyak tanah ke LPG di Desa Buatan Baru Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.
 - b. Untuk mengetahui upaya pemerintah terkait sosialisasi *konversi* minyak tanah ke LPG di Desa Buatan Baru Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.

- c. Untuk mengetahui tjiawuan ekonomi Islam terhadap kebijakan *konversi* minyak tanah ke LPG.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan untuk meningkatkan wawasan penulis mengenai pemasaran terutama terkait dengan pembahasan kebijakan.
- b. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam upaya menentukan atau memberikan kebijakan kepada masyarakat dan bagaimana keberhasilan sosialisasi program pemerintah selanjutnya.
- c. Bagi Masyarakat, sebagai wacana terkait pentingnya kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan pemerintah.
- d. Bagi Pihak Lain, dapat memberikan manfaat sebagai salah satu acuan dan informasi tambahan serta perbandingan bagi peneliti yang lain, khususnya yang melakukan penelitian taerhadap masalah yang serupa.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field riset*) yang mengambil lokasi tempat di Desa Buatan Baru Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Dengan pertimbangan bahwa di desa ini merupakan salah satu desa di Kabupaten Siak yang masyarakatnya masih banyak yang menggunakan

kompur minyak tanah sekalipun pada kenyataannya pemerintah daerah tersebut sudah turun tangan.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Buatan Baru Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.

b. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah kebijakan pemerintah dalam rangka *konversi* minyak tanah ke LPG.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Populasi adalah wilayah yang terdiri dari objek dan subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Buatan Baru Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak yang berjumlah 520 KK dan perangkat Desa Buatan Baru yang berjumlah 5 orang. Mengingat jumlah populasi yang sangat banyak, maka penulis mengambil sampel 10% dari 520 KK yaitu 52 KK yang diambil dengan menggunakan teknik *random sampling* (sampel acak) dan 5 orang perangkat desa.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data tersebut menjadi data sekunder kalau dipergunakan orang yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian yang bersangkutan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti sendiri, misalnya dokumen-dokumen resmi organisasi atau publikasi lainnya. Jadi, data sekunder berasal dari tangan kedua yang melewati satu atau lebih dua pihak yang bukan peneliti sendiri serta buku-buku perpustakaan yang dapat membantu dalam penelitian ini guna melengkapi data-data.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Observasi, yaitu penulis langsung melihat dan mengamati di lapangan.
- b. Wawancara, yakni penulis melakukan wawancara langsung dengan pimpinan dan karyawan serta pihak yang terkait guna melengkapi data yang diperlukan.
- c. Kuisioner atau angket, yaitu penulis mengajukan beberapa pertanyaan tertulis kepada masyarakat atau pihak-pihak responden mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.

- d. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat, dan memanfaatkan data yang ada di instansi yang berkaitan dengan penelitian, berupa dokumen-dokumen resmi selama periode yang telah ditentukan sehingga akan diperoleh data yang *relevan* dan *obyektif*.

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *deskriptif* yaitu menganalisa data yang bersifat penjelasan dari data-data dan informasi yang kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep-konsep yang mendukung pembahasan, dimana penjelasan ini menggunakan metode *kualitatif* yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

7. Metode Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh dan kemudian disimpulkan sesuai dengan penelitian.
- b. Induktif, yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat khusus kemudian menyimpulkan secara umum.
- c. Deduktif, yaitu mencari data-data yang umum kemudian disimpulkan secara khusus.

F. Sistematika Penulisan

- BAB I : Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB II : Gambaran umum Desa Buatan Baru, yang meliputi kondisi geografis, demografis, visi dan misi, pendidikan, agama, keadaan ekonomi dan sosial budaya.
- BAB III : Tinjauan umum kebijakan, yang meliputi pengertian kebijakan, kebijakan publik, kebijakan ekonomi, landasan pengambilan kebijakan, sistem-sistem perekonomian, dan kebijakan ekonomi dalam Islam.
- BAB IV : Penyajian hasil penelitian dan analisis data.
- BAB V : Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA BUATAN BARU

A. Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Buatan Baru terletak antara 100°45 – 100°52 Bujur Timur dan 0°25 – 0°32 Lintang Utara. Desa Buatan Baru termasuk salah satu desa di Kecamatan Kerinci Kanan yang menjadi Kabupaten Siak dengan batas-batas:

- Sebelah timur berbatas dengan Desa Jati Mulya.
- Sebelah barat berbatas dengan Desa Seminai.
- Sebelah selatan berbatas dengan Kebun PT. Inti Indo Sawit.
- Sebelah utara berbatas dengan Desa Kerinci Kanan.

Luas wilayah Desa Buatan Baru sekitar $\pm 1.551,23$ Hektar. Jarak dari ibu kota propinsi ± 80 km ditempuh dalam waktu 2 jam, dari ibu kota kabupaten ± 60 km dan berkedudukan di sebelah timur ibu kota kecamatan. Secara *administratif* wilayah Desa Buatan Baru terbagi dalam 4 Dusun, 4 Rukun Warga dan 17 Rukun Tetangga. Sebagian besar desa ini merupakan daerah daratan rendah hingga menengah, dibagian barat yang berbatas dengan Desa Seminai terdapat sebagian rawa-rawa dengan ketinggian sekitar 15 meter diatas permukaan laut. Desa ini beriklim tropis *temperatur* rata-rata pada siang hari 31-32°C dan pada malam hari 20-22°C, kelembapan udara 90-100% dan rata-rata curah hujan berkisar 780-2461 mm/tahun.

Secara *geomorfologi* Desa Buatan Baru merupakan daratan yang bergelombang dan wilayah bagian barat agak rawa, di Desa Buatan Baru sebagian besar penduduknya bermata pencaharian berkebun khususnya kelapa sawit.¹

B. Gambaran Umum Demografis

Berdasarkan data administrasi pemerintah desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi adalah 2087 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1112 jiwa, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 975 jiwa. Data penduduk saat ini diambil dari blangko yang diisi dari ketua RT dilingkungan masing-masing.

Tabel II.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	1112	53,28
2	Perempuan	975	46,72
	Jumlah	2087	100

Sumber : Kantor Desa Buatan Baru, Tahun 2011.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Desa Buatan Baru sebanyak 2087 jiwa. Penduduk dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak yaitu 53,28% atau 1112 jiwa, sedangkan penduduk perempuan lebih sedikit yaitu 46,72% atau sebanyak 975 jiwa.

¹ Sumber Data, *Kantor Desa Buatan Baru Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak*, 2011.

C. Visi dan Misi Desa Buatan Baru

1. Visi

Visi Desa Buatan Baru adalah “Terwujudnya Desa Buatan Baru Sebagai Desa Yang Maju Dalam Perekonomian Yang Didukung Dengan Lingkungan Masyarakat Yang Agamis Dan Sejahtera Untuk Otonomi Desa Tahun 2020”.

2. Misi

Adapun Misi Desa Buatan Baru adalah:

- a. Membangun masyarakat yang berkualitas lahir dan batin.
- b. Aparatur pemerintah yang proporsional, bertanggung jawab dan amanah.
- c. Menggali dan mengembangkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam sebagai modal dasar pembangunan.

D. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Di Desa Buatan Baru ada beberapa tingkat pendidikan yang dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel II.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Belum sekolah, TK dan PAUD	139	6,67
2	SD	878	42,09
3	SMP	698	33,44
4	MAN dan MTs	6	0,28
5	SMA	298	14,27
6	D1 s/d D3	42	2,01
7	S1	26	1,24
	Jumlah	2087	100

Sumber : Kantor Desa Buatan Baru, Tahun 2011.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang belum bersekolah atau yang sedang berada pada tingkat PAUD dan TK sebanyak 139 orang atau 6,67%, sedangkan penduduk tamatan SD dan yang sedang berada di tingkat SD sebanyak 878 orang atau 42,09%, penduduk yang terdaftar tamatan SMP dan yang sedang belajar pada tingkat tersebut sebanyak 698 orang atau 33,44%, penduduk tamatan SMA dan yang sedang berada pada tingkat SMA sebanyak 298 orang atau 14,27%, penduduk tamatan D1 s/d D3 sebanyak 42 orang atau 2,01%, penduduk tamatan S1 sebanyak 26 orang atau 1,24%, dan penduduk tamatan MAN dan MTs sebanyak 6 orang atau 0,28%.

Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Buatan Baru Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak adalah sebagai berikut.

Tabel II.3
Jumlah Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	PAUD	1	20
2	TK	1	20
3	SD	1	20
4	MDA	1	20
5	SMP	1	20
	Jumlah	5	100

Sumber : Kantor Desa Buatan Baru, Tahun 2011.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa ada 5 sarana pendidikan yang ada di desa Buatan Baru, yang meliputi PAUD, TK, SD, SMP dan MDA yang masing-masing jumlahnya 1 unit.

E. Agama

Agama merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam memberikan bimbingan dan arahan bagi setiap pemeluknya masing-masing.

Agama merupakan petunjuk dan jalan yang menjadi barometer dalam menempuh kehidupan di dunia yang fana ini. Dengan selalu berpegang pada agama, maka seseorang akan mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat.

Masyarakat Desa Buatan Baru tergolong taat beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Masyarakat yang beragama Islam sering menjalankan sholat berjamaah di masjid dan mushalla-mushalla, hal ini terbukti dari kegiatan-kegiatan keagamaan yang dijalankan masyarakat seperti kaum ibu-ibu melaksanakan wirid rutin satu kali seminggu pada masing-masing RT, begitu juga dengan bapak-bapaknya. Sedangkan pemuda pemudinya juga aktif dalam kegiatan keagamaan seperti mengajar ngaji bersama anak-anak kecil. Adapun yang beragama Kristen menjalankan ibadahnya setiap hari minggu ke gereja.²

Berikut ini adalah jumlah penduduk Desa Buatan Baru berdasarkan agama yang mereka yakini.

Tabel II.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah	Persentase (%)
1	Islam	1883	90,23
2	Katholik	66	3,16
3	Protestan	138	6,61
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
	Jumlah	2087	100

Sumber : Kantor Desa Buatan Baru, Tahun 2011.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Buatan Baru memeluk agama Islam yang jumlahnya 1883 orang atau 90,23%, sedangkan yang memeluk agama Katholik sebanyak 66 orang atau 3,16%, dan yang

² Nana Rukmana, (Kepala Desa Buatan Baru), *Wawancara*, Tanggal 13 Juni 2012.

memeluk agama Kristen Protestan sebanyak 138 orang atau 6,61%. Sedangkan agama Hindu dan Budha tidak dianut oleh penduduk Desa Buatan Baru.

Adapun jumlah sarana ibadah yang ada di Desa Buatan Baru dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.5
Jumlah Sarana Ibadah

No	Jenis Sarana Ibadah	Jumlah	Persentase (%)
1	Masjid	3	15,79
2	Mushalla	14	73,68
3	Gereja	2	10,53
	Jumlah	19	100

Sumber : Kantor Desa Buatan Baru, Tahun 2011.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa ada 3 jenis sarana ibadah, yaitu masjid yang jumlahnya 3 buah atau 15,79% dan mushalla sebanyak 14 buah atau 73,68% yang keduanya merupakan tempat beribadah umat Islam. Sedangkan gereja hanya ada 2 buah atau 10,53% yang menjadi tempat ibadah umat Katholik dan Kristen Protestan.

F. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat

Masalah sosial dan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan adanya rasa saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang satu dengan yang lain saling melakukan transaksi ekonomi sehingga terjalinlah sosialisasi antar masyarakat.

Keadaan ekonomi di Desa Buatan Baru cukup stabil, karena masyarakat yang kurang mampu terbantu dengan adanya raskin (beras miskin). Sedangkan

masyarakat yang mempunyai kebun sawit masih tetap stabil meskipun hasil panen mereka sedang anjlok.³

Adapun mata pencaharian masyarakat Desa Buatan Baru dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel II.6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani	656	31,43
2	Pelajar	556	26,64
3	Ibu Rumah Tangga	429	20,55
4	Buruh Tani	173	8,29
5	Wira Swasta	121	5,80
6	PNS	34	1,63
7	Guru	15	0,72
8	Supir	10	0,48
9	Tukang	5	0,24
10	TNI/Polisi	5	0,24
11	Belum Bekerja	83	3,98
	Jumlah	2087	100

Sumber : Kantor Desa Buatan Baru, Tahun 2011.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mata pencaharian penduduk Desa Buatan Baru sangat bervariasi, namun kebanyakan mereka bekerja sebagai petani yang mencapai jumlah 656 orang atau 31,43%, kemudian pelajar sebanyak 556 orang atau 26,64%, kemudian ibu rumah tangga sebanyak 429 orang atau 20,55%, selanjutnya yang bekerja sebagai buruh tani sebanyak 173 orang atau 8,29%, sedangkan penduduk yang sudah memiliki usaha sendiri atau berwiraswasta sebanyak 121 orang atau 5,80%, adapun penduduk yang sudah menjadi PNS sebanyak 34 orang atau 1,63%, dan yang bekerja sebagai guru sebanyak 15 orang atau 0,72%, kemudian yang bekerja sebagai supir sebanyak 10 orang atau 0,48%,

³ Tarwadi, (Kaur Pemerintahan Desa Buatan Baru), *Wawancara*, Tanggal 13 Juni 2012.

kemudian yang menjabat sebagai TNI/Polisi sebanyak 5 orang atau 0,24%, adapun yang bekerja sebagai tukang sebanyak 5 orang atau 0,24%, sedangkan 83 orang atau 3,98% belum bekerja.

G. Adat Istiadat dan Budaya

Adat istiadat merupakan ciri-ciri suatu masyarakat. Warga Desa Buatan Baru pada umumnya merupakan *transmigran* dari Jawa pada tahun 1991, selain itu pendatang yang berasal dari Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Pada umumnya penduduk di Desa Buatan Baru sangat memegang teguh adat istiadat Jawa, ini dapat dilihat dari pelaksanaan acara khitanan, perkawinan, syukuran, kematian, peringatan *muharam* (satu sura), dan lain-lain yang menggunakan adat Jawa. Adapun bahasa yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari adalah bahasa Jawa, Sunda dan Nasional. Masyarakat Desa Buatan Baru juga selalu mengembangkan kepedulian sosial dalam mewujudkan cita-cita bersama, hal ini biasa diwujudkan dalam bentuk gotong royong dan tolong menolong antar sesama.⁴

⁴ Nana Rukmana, (Kepala Desa Buatan Baru), *Wawancara*, Tanggal 13 Juni 2012.

BAB III

TINJAUAN UMUM KEBIJAKAN

A. Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah sebuah metode atau rangkaian tindakan yang dipakai oleh manajemen untuk menuntun secara rutin pengambilan keputusan masa depan. Kebijakan merupakan sebuah mekanisme pembuat keputusan yang otomatis dalam situasi tertentu.¹

Pal mendefinisikan kebijakan merupakan jalan atau cara bagi lembaga yang berperan sebagai pemegang kewenangan publik (dalam hal ini pemerintah) untuk mengatasi suatu permasalahan dan sekelompok permasalahan yang saling berhubungan. Elis juga berpendapat bahwa kebijakan adalah cara atau jalan yang dipilih pemerintah untuk mendukung suatu aspek dari ekonomi termasuk sasaran yang dicari pemerintah untuk mencapainya dan pemilihan metode untuk mencapai tujuan dan sasaran itu. Sedangkan menurut *United Nations*, kebijakan adalah suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, arah tindakan tertentu, program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.²

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan definisi kebijakan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman ini bisa amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau

¹ William J Stanton, *Prinsip Pemasaran* (Jakarta: Erlangga, 1984), Edisi ke-7, Jilid ke-1, h.42.

² Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 34.

terperinci, bersifat *kualitatif* atau *kuantitatif*, *publik* atau *privat*. Kebijakan dalam maknanya yang seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu program, mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.³

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah cara dan tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah pembangunan secara keseluruhan maupun pada bidang-bidang tertentu untuk mencapai tujuan yang sudah dirumuskan dengan mengeluarkan keputusan, strategi, perencanaan, maupun implementasinya di lapangan dengan menggunakan instrumen tertentu.

Kebijakan dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk, yaitu:

- a. Instrumen legal (hukum) seperti peraturan perundangan;
- b. Instrumen ekonomi seperti kebijakan fiskal, pajak subsidi, harga, kebijakan keuangan, moneter dan keuangan;
- c. Petunjuk dan arahan atau hasil instruksi dan perintah;
- d. Pernyataan politik (*political statement*); dan
- e. Garis-garis besar pembangunan, strategi, rencana, program dan kemudian dapat diterjemahkan ke dalam proyek atau rencana anggaran tertentu.⁴

Adapun elemen-elemen penting kebijakan yaitu:

- a. Masalah yang akan diatasi dengan kebijakan;
- b. Cara untuk mengatasi masalah tersebut;
- c. Tujuan yang akan dicapai;
- d. Kepentingan yang diinginkan;

³ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.2.

⁴ Euis Amalia, *Op.cit.*, h .35-36.

- e. Aktor yang melakukan;
- f. Instrumen atau perangkat untuk melaksanakan kebijakan; dan
- g. Aturan untuk menggunakan instrumen tersebut.⁵

B. Kebijakan Publik

Ciri kebijakan publik yang utama adalah apa yang oleh David Easton disebut sebagai orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik, yakni para tetua adat, para ketua suku, para *eksekutif*, para *legislator*, para hakim, para *administrator*, para raja/ratu dan lain sebagainya.⁶

Riant Nugroho D membagi jenis-jenis kebijakan publik berdasarkan 3 kategori.

Pertama berdasarkan pada makna dari kebijakan publik. Berdasarkan maknanya, maka kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan. Kebijakan publik berdasar makna kebijakan publik dengan demikian terdiri dua jenis, yakni: kebijakan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan kebijakan atau hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan.⁷

Kedua, pembagian jenis kebijakan publik yang didasarkan pada lembaga pembuat kebijakan publik tersebut. Pembagian menurut kategori ini menghasilkan tiga jenis kebijakan publik, yaitu:

⁵ *Ibid.*

⁶ Solichin Abdul Wahab, *Op.cit.*, h.5.

⁷ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, (Jakarta: PT Gramedia, 2004), h.57.

1. Kebijakan publik yang dibuat oleh *legislatif*. Kebijakan publik ini disebut pula sebagai kebijakan publik tertinggi. Hal ini didasarkan teori *Politica* yang diajarkan oleh Montesquieu pada abad pencerahan di Perancis abad 7.
2. Kedua kebijakan publik yang dibuat dalam bentuk kerjasama antara *legislatif* dengan *eksekutif*. Model ini bukan menyiratkan ketidakmampuan *legislatif*, namun mencerminkan tingkat *kompleksitas* permasalahan yang tidak memungkinkan *legislatif* bekerja sendiri. Di Indonesia produk kebijakan publik yang dibuat oleh kerjasama kedua lembaga ini adalah undang-undang di tingkat nasional dan peraturan daerah di tingkat nasional untuk hal-hal tertentu yang bersifat sementara sampai UU-nya dibuat. Bahkan di Indonesia yang mengesahkan UU adalah Presiden. UU sendiri disahkan setelah ada persetujuan dari *legislatif* dan *eksekutif*. Dalam hal setelah persetujuan setelah 30 hari *eksekutif* tidak segera mengesahkan, maka sesuai dengan Pasal 20 ayat 5 UUD 1945, maka Rancangan UU tersebut dianggap sah dengan sendirinya. Di sini tampak bahwa keluaran *legislatif* relatif lebih tinggi daripada *eksekutif*.
3. Ketiga, kebijakan publik yang dibuat oleh *eksekutif* saja. Di dalam perkembangannya, peran *eksekutif* tidak cukup hanya melaksanakan kebijakan yang dibuat *legislatif*, karena dengan semakin meningkatnya *kompleksitas* permasalahan kehidupan bersama sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan publik pelaksanaan yang berfungsi sebagai turunan dari kebijakan publik di atasnya. Di Indonesia ragam kebijakan publik yang ditangani *eksekutif* bertingkat sebagai berikut: (1) Peraturan Pemerintah, (2)

Keputusan Presiden (Keppres), (3) Keputusan Menteri (Kepmen) atau Lembaga Pemerintah Nondepartemen, (4) dan seterusnya, misalnya Instruksi Menteri. Sedangkan di tingkat daerah terdapat: (1) Keputusan Gubernur dan bertingkat Keputusan Dinas-Dinas di bawahnya, (2) Keputusan Bupati, (3) Keputusan Walikota dan bertingkat keputusan dinas-dinas di bawahnya.⁸

Pembagian jenis kebijakan publik ketiga didasarkan pada karakter dari kebijakan publik yang sebenarnya merupakan bagian dari kebijakan publik tertulis formal. Di sini kebijakan publik dibagi menjadi dua yaitu: Pertama, *regulasi* versus *de-regulatif*, atau *restriktif* versus *non-restriktif*, yaitu kebijakan yang menetapkan hal-hal yang dibatasi dan hal-hal yang dibebaskan dari pembatasan-pembatasan. Sebagian besar kebijakan publik berkenaan dengan hal-hal yang *regulatif/ restriktif* dan *regulatif non restriktif*. Kedua, *alokatif* versus *distributif* atau *redistributif*, yaitu kebijakan *alokatif* dan *distributif*. Kebijakan ini biasanya berupa kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan anggaran atau keluaran publik.⁹

C. Kebijakan Ekonomi

Kebijakan ekonomi atau politik ekonomi (*economic policy*) yaitu cara-cara yang ditempuh atau tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah dengan maksud untuk mengatur kehidupan ekonomi nasional guna mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan yang mau dicapai telah ditetapkan oleh para wakil

⁸ *Ibid.*, h.60.

⁹ *Ibid.*, h.62.

rakyat di MPR-DPR dan dituangkan dalam GBHN, yang dapat diringkas dalam “Trilogi Pembangunan”: kestabilan, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan.¹⁰

Adapun tujuan kebijakan ekonomi yaitu:

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Tujuan ini dapat dicapai dengan bertambahnya kuantitas dan kualitas faktor-faktor produksi dalam jangka panjang seperti tenaga kerja, modal dan teknologi, sehingga kapasitas produksi nasional terus dapat ditingkatkan. Pertumbuhan ekonomi perlu dijaga guna menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2. Mewujudkan keadaan ekonomi yang stabil.

Keadaan ekonomi yang stabil dapat dicapai dengan kestabilan tingkat pendapatan dan penggunaan tenaga kerja yang penuh. Kekurangan pengeluaran *agregat* merupakan faktor yang terpenting yang menimbulkan keadaan tersebut. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang berusaha menambah pengeluaran *agregat* biasanya hanya mampu mengurangi pengangguran tetapi tidak selalu dapat mencapai kegiatan perekonomian pada penggunaan tenaga kerja.

3. Menghindari *inflasi*.

Tingkat *inflasi* dapat dikendalikan dengan menjaga kestabilan dalam tingkat harga, kestabilan ekspor dan impor yang menjamin keamanan neraca pembayaran. Sering sekali *inflasi* terwujud akibat permintaan *agregat*

¹⁰ T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), Edisi Revisi, h.225.

masyarakat yang berlebihan atau kenaikan dalam biaya produksi. Kebijakan pemerintah diperlukan untuk mengatasi masalah *inflasi* seperti itu.

4. Penggunaan tenaga kerja penuh tanpa *inflasi*.

Dua tujuan ini sulit diciptakan sekaligus karena bagaikan dua sisi mata uang, apabila kebijakan pemerintah meningkatkan pengeluaran mungkin dapat meningkatkan kesempatan kerja tetapi tidak dapat menjamin stabilnya harga-harga. Sebaliknya, jika kebijakan pemerintah mengurangi pengeluaran memang dapat menekan *inflasi* tetapi tidak dapat mengatasi masalah pengangguran.

5. Neraca pembayaran yang tidak *defisit*.

Neraca pembayaran yang *defisit* berimplikasi kepada meningkatnya pengangguran. Sumber *defisit* neraca pembayaran Indonesia adalah pada neraca transaksi berjalan dari jasa dan lalu lintas modalnya minus. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah di sektor keuangan dan perdagangan yang dapat menggairahkan ekspor dan investasi luar negeri.

6. Mewujudkan pemerataan dan keadilan pembangunan.

Jika pembangunan ekonomi dan hasil-hasilnya terdistribusi secara adil antar golongan masyarakat dan daerah, maka kemakmuran suatu bangsa dapat dicapai. Sebaliknya, jika tidak tercapai keadilan maka akan muncul berbagai gejala seperti tuntutan pelaksanaan otonomi khusus dan keinginan sebagian daerah untuk merdeka.¹¹

¹¹ Wahyu Budi Utami, *Tujuan Dan Kebijakan Ekonomi*, (<http://wahyubudiutami.blogspot.com/2012/01/tujuan-dan-kebijakan-ekonomi.html>), akses 17 Oktober 2012.

Kebijakan ekonomi dapat dibedakan dalam tiga bentuk kebijakan, yaitu:

1. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran *agregat* dalam perekonomian.

2. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral untuk mempengaruhi penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga, dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran *agregat*.

3. Kebijakan Segi Penawaran

Yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan kerja untuk mempertinggi *efisiensi* kegiatan perusahaan-perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barangnya dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik.¹²

D. Landasan Pengambilan Kebijakan

Kebijakan-kebijakan para penguasa dirancang, dibuat dan dilaksanakan untuk memenuhi hajat hidup masyarakat agar semakin meningkat. Tuntutan masyarakat tersebut tidak hanya dalam arti kuantitas, tetapi juga dalam arti kualitas. Disamping setiap kebijakan harus disertai dengan aturan yang mengaturnya. Para pihak pembuat kebijakan juga harus sungguh-sungguh menerapkan kebijakan yang telah mereka buat sendiri serta tetap berpegang teguh,

¹² Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Edisi ke-3, h.24-25.

jangan sampai kebijakan tersebut diterapkan tanpa melihat situasi sosial masyarakat.

Sebagaimana dalam kaidah ushul fiqih berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالـ

“Kebijakan imam (pemimpin) terhadap rakyatnya itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan”¹³

Kaidah ini memberikan suatu pengertian bahwa setiap tindakan atau kebijakan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan, sebab pemimpin adalah pengemban amanat rakyat (umat) dan untuk itulah sebagai petunjuk dalam kehidupan mereka serta harus memperhatikan kemaslahatannya.¹⁴

Kaidah ini diperkuat dengan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Sa'id bin Mansur, dari Abu Ahwash dari Abi Ishaq dari Al-Barra' bin 'Azib beliau berkata:

إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته

وإن استغنيت استعفت¹⁵

Artinya: “Sungguh aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah seperti kedudukan seorang wali anak yatim, jika aku membutuhkan aku mengambil dari padanya, jika aku dalam kemudahan aku mengembalikannya, dan jika aku berkecukupan aku menjauhinya”.

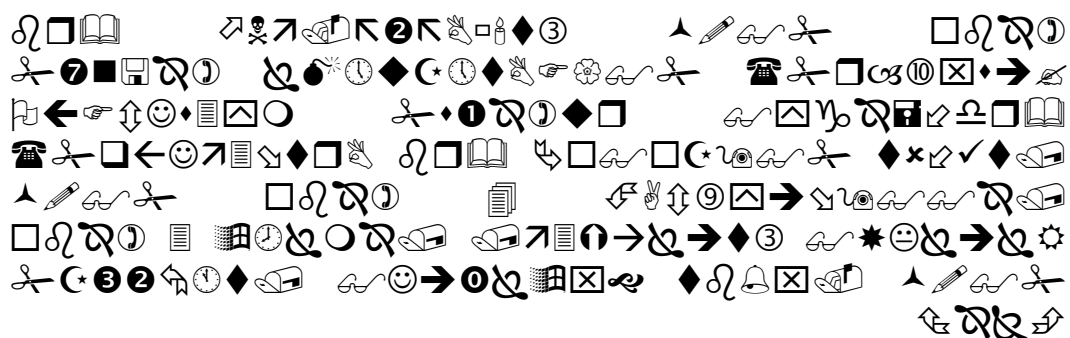
¹³ Imam Musbikin, *Qawaid Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h.124.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Al-Imam Al-'Alamah Al-Mujtahid Jalaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i, *Al-Asybah Wa An-Nadhoir Fi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, (Al-Maktab Al-Thaqafy: 2007), h.160.

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan keluarganya atau kelompoknya.

Kaidah ini juga diperkuat oleh firman Allah surat An-Nisaa' ayat 58:



Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (QS. An-Nisaa’: 58)¹⁶

Banyak contoh yang berhubungan dengan kaidah tersebut yaitu setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai atau dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan kemudharatan rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan di jauhi. Dalam upaya-upaya pembangunan misalnya, membuat irigasi untuk petani, membuka lapangan kerja yang padat karya, melindungi hutan lindung, menjaga lingkungan, mengangkat pegawai-pegawai yang amanah dan profesional, dan lain sebagainya.¹⁷

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h.79.

Para ulama membagi maslahat dalam pandangan syara' sesuai dengan petunjuk nash-nash syari'at dalam hukumnya kepada tiga bagian berikut:¹⁸

1. *Al-Dharuriyat* (kebutuhan primer), yaitu perkara yang dapat menjaga kelima tujuan pokok (agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan) berupa pekerjaan, tindakan, aturan, dan lain-lain.
2. *Al-Hajiyat* (kebutuhan sekunder), yaitu perbuatan dan tindakan-tindakan yang ketiadaannya tidak mengganggu kelima tujuan pokok diatas.
3. *Al-Tahsiniyat* (kebutuhan tersier), yaitu sesuatu yang tidak mendesak bagi kehidupan jika ditinggalkan, tetapi memeliharanya termasuk dari akhlak mulia atau kebiasaan yang baik.

Syarat-syarat berhujjah dengan maslahat adalah sebagai berikut:

Pertama, ia haruslah merupakan suatu kemaslahatan yang hakiki dan bukan suatu kemaslahatan yang bersifat dugaan.

Kedua, ia adalah masalah umum dan bukan untuk kemaslahatan pribadi, artinya tidak boleh di syari'atkan khusus bagi kelompok atau penguasa.

Ketiga, bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan hukum atau dengan prinsip yang ada nash atau ijma'.¹⁹

¹⁷ H.A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), edisi 1, cet. Ke-2, h.147-148.

¹⁸ Musthafa Ahmad Al-Zarqa, *Hukum Islam dan Perbuatan Sosial Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqh*, alih bahasa Ade Dedi Rohanaya, (Jakarta: Riora Cipta, 2000), h.35.

¹⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, alih bahasa Halimuddin, SH, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), cet. Ke-5, h.101.

E. Sistem-Sistem Perekonomian

Kebijakan dipengaruhi oleh sistem perekonomian. Sistem perekonomian yang dipakai seringkali menjadi latar belakang lahirnya sebuah kebijakan. Sistem perekonomian merupakan kerangka sosial mengenai tujuan, peraturan dan *insentif* untuk menentukan apa, bagaimana dan untuk siapa barang dan jasa itu dihasilkan.²⁰

Berdasarkan mekanisme koordinasinya, sistem ekonomi dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Sistem Tradisi (*Tradition Economy*)

Pada tahap ini tujuan berproduksi tidaklah terlalu dimotivasi oleh semangat mencari keuntungan. Skala berproduksi masih sangat kecil, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Kelebihan produksi ditukarkan (*barter*) dengan produksi lain dari keluarga/unit ekonomi yang lain.²¹

2. Sistem Komando (*Command Economy*)

Dalam sistem ekonomi berencana pemerintah merupakan unit pembuat keputusan tunggal. Pemerintah menjadi pemilik semua faktor produksi dan yang memutuskan untuk apa dan bagaimana faktor produksi itu dialokasikan, serta pemerintah pula yang menentukan bagaimana kebutuhan dan keinginan masyarakat harus dipenuhi. Dalam sistem perekonomian seperti ini tidak ada insentif swasta untuk berusaha karena setiap faktor produksi dan keputusan

²⁰ M. Suparmoko, *Pokok-Pokok Ekonomika*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), cet ke-1, h.15.

²¹ Prathama Rahardja, *Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), edisi ke-4, h.358.

penggunaannya dipusatkan di tangan pemerintah. Tidak ada pemilikan faktor produksi ada di tangan swasta.²²

3. Sistem Ekonomi Pasar (*Market Economy*)

Dalam perekonomian dengan mekanisme pasar, peranan pemerintah sangat minimal dan hanya berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban umum, kondisi lingkungan yang baik, penyediaan barang publik untuk kepentingan umum, serta memelihara keadilan. Pemerintah bertindak sebagai penengah dan memelihara peraturan perundangan bila terdapat pertentangan antar individu atau kelompok demi melindungi warga negara dan masyarakat umum.²³

Sedangkan berdasarkan penekanan hak kepemilikan, sistem ekonomi dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu:

1. Sistem Ekonomi Kapitalis (*Capitalist Economy*)

Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang aset-aset produktif atau faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu/swasta. Sementara tujuan utama kegiatan produksi adalah menjual untuk memperoleh laba.²⁴

Adapun prinsip dasar sistem ekonomi kapitalis yaitu:

- a. Kebebasan memilih harta secara perorangan;
- b. Kebebasan ekonomi dan persaingan bebas; dan

²² M. Suparmoko, *Loc.cit.*

²³ *Ibid.*, h.18.

²⁴ Prathama Rahardja, *Op.cit.*, h.364.

c. Ketimpangan ekonomi.²⁵

2. Sistem Ekonomi Sosialis (*Socialist Economy*)

Dalam sistem ini penguasaan individu atas aset-aset ekonomi atau faktor-faktor ekonomi harus ditekan sesedikit mungkin. Itulah sebabnya, dalam masyarakat sosialis sebagian besar kepemilikan merupakan kepemilikan sosial.²⁶

Adapun prinsip dasar ekonomi sosialis yaitu:

- a. Pemilikan harta oleh negara;
- b. Kesamaan ekonomi; dan
- c. Disiplin politik.²⁷

Adapun sistem ekonomi yang tidak dapat diklasifikasi berdasarkan kedua cara diatas yaitu:

1. Sistem Ekonomi Campuran (*Mixed Economy*).

Sistem ekonomi campuran lebih umum dan lebih praktis dibanding sistem ekonomi yang lain. Pemerintah akan lebih banyak berfungsi menghasilkan barang publik, barang untuk memenuhi kebutuhan sosial, serta barang dengan eksternalitas tinggi, yang semuanya gagal dihasilkan oleh mekanisme pasar. Lebih jauh lagi pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal distribusi pendapatan yang adil

²⁵ Akhmad Mujahidin, *Buku Ajar Ekonomi Islam II*, (Pekanbaru: Suska Press, 2010), h.17-18.

²⁶ Prathama Rahardja, *Loc.cit.*

²⁷ Akhmad Mujahidin, *Op.cit*, h.19.

dan memuaskan bila faktor-faktor produksi dialokasikan secara efisien sesuai dengan mekanisme pasar.²⁸

Sebagai contoh negara-negara yang menganut sistem ekonomi campuran adalah Malaysia, Singapura dan Indonesia. Walaupun sistem ekonomi Indonesia bersifat campuran tetapi sistem ekonomi Indonesia merupakan sistem ekonomi yang digali dari bumi nurani Indonesia sendiri yang disebut sebagai sistem ekonomi pancasila, yaitu mencerminkan keseimbangan antara kepentingan umum dan individu. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 dinyatakan bahwa: 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara, dan 3) Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.²⁹

2. Sistem Ekonomi Islam

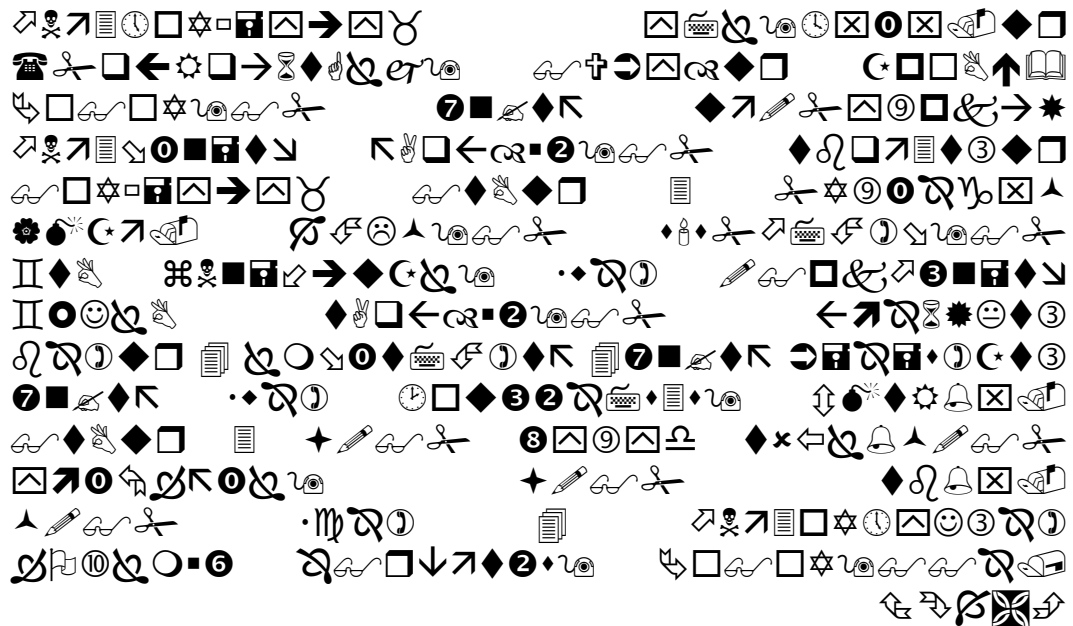
Menurut Yusuf Qardhawi, sistem ekonomi Islam tidak berbeda dengan sistem ekonomi lainnya, dari segi bentuk, cabang, rincian, dan cara pengaplikasian yang beraneka ragam, tapi menyangkut gambaran global yang mencakup pokok-pokok petunjuk, kaidah-kaidah pasti, arahan-arahan prinsip yang juga mencakup sebagian cabang penting yang bersifat spesifik ada perbedaannya. Hal itu karena sistem Islam selalu menetapkan secara global dalam masalah-masalah yang mengalami perubahan karena perubahan lingkungan dan

²⁸ M. Suparmoko, *Op.cit.*, h.19.

²⁹ *Ibid.*

zaman. Sebaliknya menguraikan secara rinci pada masalah-masalah yang tidak mengalami perubahan.³⁰

Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi pertengahan yang adil, yang dengan Allah menjadikan ciri khas utama ummat ini, sebagaimana firman-Nya:



Artinya: “Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang Telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia”. (QS. Al-Baqarah (2): 143)³¹

Ciri khas pertengahan ini tercermin dalam keseimbangan yang adil yang ditegakkan oleh Islam di antara individu dan masyarakat, sebagaimana ditegakkan

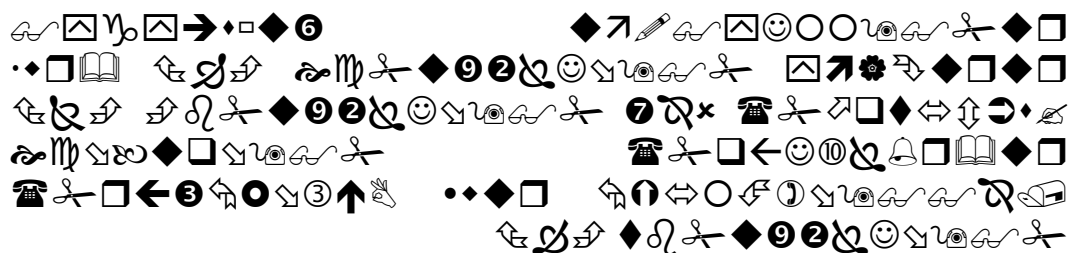
³⁰ Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.85.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h.21.

dalam berbagai pasangan lainnya: dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, idealisme dan fakta, dan pasangan-pasangan lainnya yang sudah terkenal.

Sistem ekonomi Islam tidak menganiaya masyarakat, terutama masyarakat lemah seperti yang dilakukan oleh sistem kapitalis. Tidak pula menganiaya hak-hak dan kebebasan individu, seperti yang dilakukan oleh komunis terutama marxisme. Akan tetapi pertengahan antara keduanya, tidak menyia-nyiakan dan tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas dan tidak pula merugikan.³²

Sebagaimana firman Allah berikut ini:



Artinya: "Dan Allah Telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu". (QS. Ar-rahman (55): 7-9)³³

Islam telah memberikan hak masing-masing dari individu dan masyarakat secara utuh, dan menuntut penunaian segala kewajibannya. Tetapi islam tidak melakukan hal tersebut demi menghindari *ekstrimitas sosialisme* atau kesewenang-wenangan *kapitalisme*.

Adapun prinsip dasar dalam ekonomi Islam yaitu:

1. Kebebasan individu;
2. Hak terhadap harta;

³² Akhmad Mujahidin, *Op.cit*, h.28.

³³ Departemen Agama RI, *Op.cit*, h.479.

3. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar;
4. Kesamaan sosial;
5. Jaminan sosial;
6. Distribusi kekayaan;
7. Larangan menumpuk kekayaan; dan
8. Kesejahteraan individu dan masyarakat.³⁴

F. Kebijakan Ekonomi Dalam Islam

Kebijakan negara dalam bidang perekonomian secara tersurat telah jelas tercantum dalam rujukan klasik ekonomi Islam, yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Kebijakan ekonomi tidak lepas dari sifat dan bentuk sistem ekonomi Islam yang terpadu (*integratif*) dan menyeluruh (*comprehensif*). Rangkaian kebijakan ekonomi Islam menggambarkan secara jelas sifat terpadu dan menyeluruh tadi, yang merefleksikan karakteristik, mekanisme, regulasi dan tujuan ekonomi Islam.³⁵

Dalam perekonomian konvensional, kebijakan ekonomi biasanya dibedakan dalam dua jenis berdasarkan bentuk aktifitasnya, yaitu kebijakan moneter (sektor moneter) dan kebijakan fiskal (sektor riil). Berdasarkan definisinya, ekonomi Islam cenderung tidak mendikotomikan kebijakan dalam dua kebijakan ini. Karena karakteristiknya sistem ekonomi Islam lebih cenderung bersifat perekonomian riil.

³⁴ Akhmad Mujahidin, *Op.cit*, h.20-21.

³⁵ *Ibid.*, h.107-108.

Namun dari beberapa aktifitas ekonomi yang dilakukan negara ada beberapa yang mungkin dapat saja dikategorikan sebagai aktifitas atau kebijakan moneter, berdasarkan definisi yang konvensional berikan. Kegiatan yang dapat digolongkan pada kebijakan moneter ini, seperti pembuatan mata uang, pengawasan uang beredar, nilai tukar mata uang, transfer dana, intermediasi dan pengawasan investasi, serta sekuritasi.

Penentuan jenis kebijakan secara kualitas dan kuantitasnya juga mempertimbangkan apa yang menjadi masukan dari lembaga hisbah (*market regulator and supervisor*). Bahkan pada bidang tertentu dan pada kondisi tertentu lembaga hisbah ini dapat melakukan sebuah kebijakan sendiri atas nama negara. Misalnya kebijakan intervensi pasar, ketika harga di pasar secara umum meningkat dengan tajam dan mengancam tidak terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat, maka negara melalui *hisbah* dapat melakukan *intervensi* berupa *intervensi* secara langsung dengan menetapkan harga atau secara tidak langsung, yaitu dengan menyediakan stok barang yang cukup.³⁶

Dalam literatur klasik menurut Hasanuzzaman, kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan memiliki tujuan-tujuan yang cukup *definitif*. Hasanuzzaman mengungkapkan setidaknya ada delapan tujuan kebijakan ekonomi, meliputi:

1. Meningkatkan kecenderungan tingkat konsumsi,
2. Meningkatkan distribusi pendapatan dan kekayaan,
3. Stabilitas harga barang-barang kebutuhan dasar,

³⁶ *Ibid.*

4. Terjamin ketersediaan barang-barang kebutuhan,
5. Ekspansi produksi,
6. Memuaskan kebutuhan kolektif dan aktifitas kesejahteraan lainnya,
7. Perlindungan konsumen, dan
8. Pertahanan dan keamanan.³⁷

³⁷ *Ibid.*, h.109.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pandangan Masyarakat Desa Buatan Baru Terhadap Kebijakan *Konversi* Minyak Tanah ke LPG

Konversi minyak tanah ke LPG merupakan program pemerintah untuk pengalihan subsidi dan penggunaan minyak tanah oleh masyarakat ke LPG 3 Kg melalui pembagian paket LPG 3 Kg beserta isi, kompor, regulator dan selang secara gratis kepada masyarakat yang memenuhi kriteria yang sudah ditentukan.¹

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 13 Juni 2012 tentang Kebijakan *Konversi* Minyak Tanah Ke LPG dengan Bapak Nana Rukmana yang merupakan Kepala Desa Buatan Baru Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, beliau berpendapat:

“Pendapat saya tentang kebijakan *konversi* minyak tanah ke LPG adalah suatu terobosan yang bagus sekali karena dalam perbandingan penggunaannya LPG lebih hemat dari pada minyak tanah untuk di gunakan di sebuah keluarga. Apalagi jika dalam konversi ini benar-benar diberikan pengarahan dan pengawasan yang baik dan benar. Kalau di desa ini memang pantas jika *konversi* ini berlangsung merata di setiap rumah tangga karena kehidupan orang disini mayoritas adalah menengah ke atas. Lingkungan tidak terlalu padat dan rumah pun sudah dalam bentuk bangunan yang kokoh. Selain itu kebetulan desa ini merupakan kawasan yang ekonominya sudah mapan, jadi masyarakatnya enak diajak pindah ke LPG.”²

Pendapat ini diperkuat oleh pendapat Bapak Wiyadi selaku Sekretaris Desa Buatan Baru Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, yaitu:

¹ <http://gasdom.pertamina.com/faq.aspx>. akses tanggal 20 Juni 2012.

² Nana Rukmana, (Kepala Desa Buatan Baru), *Wawancara*, Tanggal 13 Juni 2012.

“Menurut saya kebijakan *konversi* minyak tanah ke LPG sudah sepantasnya dilakukan, mengingat konsumsi bahan bakar dunia meningkat, jadi ini bermaksud untuk menghemat bahan bakar dan keuangan tentunya. Kita sebagai warga negara yang baik, sudah sepantasnya mengikuti apa yang direncanakan pemerintah untuk warganya. Agar kita memiliki jalan yang sama dan berjalan dengan arah yang sama untuk tujuan yang sama pula. Untuk itu *konversi* ini harus terus dilakukan, demi kepentingan bersama. Warga disini pada awalnya masih banyak yang bertahan dengan minyak atau kayu bakar, tapi setelah mereka sudah tahu bagaimana manfaat *konversi*, mereka akhirnya pindah ke LPG dengan sendirinya.”³

Adapun pandangan masyarakat desa buatan baru tentang *konversi* minyak tanah ke LPG dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel IV.1
Jawaban Responden Tentang Apakah Anda Setuju dengan Program
***Konversi* Minyak Tanah ke Gas LPG**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	a. Setuju	45	86,54
2	b. Kurang Setuju	6	11,54
3	c. Tidak Setuju	1	1,92
Jumlah		52	100

Sumber: Data Olahan Angket

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 86,54% atau 45 dari responden setuju dengan program *konversi* minyak tanah ke LPG. Sedangkan 11,54% atau 6 responden kurang setuju dengan program tersebut. Adapun 1 responden atau 1,92% tidak setuju dengan *konversi* minyak tanah ke LPG. Dari hasil angket tersebut jelaslah bahwa program *konversi* minyak tanah ke LPG mendapat tanggapan baik dari masyarakat desa Buatan Baru.

Ukuran keberhasilan program *konversi* minyak tanah ke LPG dapat dilihat dari seberapa banyak masyarakat yang telah beralih ke LPG. Dari hasil angket yang penulis sebarakan kepada responden dapat dilihat dalam tabel berikut:

³ Wiyadi, (Sekretaris Desa Buatan Baru), *Wawancara*, Tanggal 13 Juni 2012.

Tabel IV.2
Jawaban Responden Tentang Apakah Anda Memakai Gas LPG Untuk Memasak Di Rumah

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	a. Ya	41	78,85
2	b. Kadang-kadang	7	13,46
3	c. Tidak	4	7,69
Jumlah		52	100

Sumber: Data Olahan Angket

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 41 responden atau 78,85% telah menggunakan kompor gas untuk memasak, sedangkan yang menggunakan gas kadang-kadang ada 7 responden atau 13,46%, mereka kadang-kadang juga menggunakan kompor minyak atau kayu bakar untuk memasak. Adapun yang tidak menggunakan kompor gas sama sekali ada 4 responden atau 7,69%, mereka lebih memilih bertahan menggunakan kompor minyak dan kayu bakar karena masih takut menggunakan gas dan menganggap gas kurang aman digunakan, sebagaimana pendapat masyarakat tentang keamanan menggunakan gas dalam tabel berikut ini:

Tabel IV.3
Jawaban Responden Tentang Apakah Menurut Anda Gas LPG Aman Digunakan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	a. Aman	36	69,23
2	b. Kurang Aman	16	30,77
3	c. Tidak Aman	0	0
Jumlah		52	100

Sumber: Data Olahan Angket

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 36 responden atau 69,23% menjawab bahwa gas aman digunakan, sedangkan 16 responden atau 30,77% menjawab kurang aman, dan yang menjawab tidak aman tidak ada atau 0%. Dari

keterangan tersebut dapat diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa gas kurang aman digunakan. Ketakutan yang mereka alami dikarenakan banyaknya pemberitaan tentang peristiwa meledaknya tabung gas ukuran 3 kg, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel IV.4

Jawaban Responden Tentang Apakah Anda Khawatir Dengan Merebaknya Berita Tentang Meledaknya Tabung Gas LPG

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	a. Khawatir	34	65,38
2	b. Kurang Khawatir	16	30,77
3	c. Tidak Khawatir	2	3,85
Jumlah		52	100

Sumber: Data Olahan Angket

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 34 responden atau 65,38% khawatir dengan berita meledaknya tabung gas, sedangkan 16 responden atau 30,77% kurang khawatir dengan pemberitaan tersebut, dan 2 responden atau 3,85% tidak khawatir dengan berita tersebut. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh berita meledaknya tabung gas menjadi faktor utama penghambat program *konversi* minyak tanah ke LPG. Dengan demikian pemerintah harus melakukan sosialisasi yang lebih mendalam tentang tata cara pemakaian kompor gas yang baik dan aman, karena apabila pemerintah tidak serius melakukan sosialisasi maka program *konversi* minyak tanah ke LPG tidak akan berjalan maksimal dan berhasil. Akibatnya masyarakatpun akan tetap bertahan menggunakan minyak tanah, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel IV.5
Jawaban Responden Tentang Apakah Anda Lebih Senang Memakai
Minyak Tanah Dibandingkan Gas LPG

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	a. Ya	4	7,69
2	b. Kadang-kadang	7	13,46
3	c. Tidak	41	78,85
Jumlah		52	100

Sumber: Data Olahan Angket

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 4 responden atau 7,69% masih lebih senang memakai minyak tanah dibanding gas, dan 7 responden atau 13,46% kadang-kadang juga lebih senang menggunakan minyak tanah meskipun harga minyak tanah telah melambung tinggi. Sedangkan 41 responden atau 78,85% lebih senang menggunakan gas.

Pada dasarnya penggunaan gas lebih mudah dan lebih efisien, selain itu juga lebih hemat karena gas lebih murah dibanding minyak tanah. Bagi masyarakat yang sudah memakai gas sebelum *konversi* tidak ada masalah, bahkan mereka lebih senang karena sekarang sudah ada agen penjual gas, jadi tidak kejauhan lagi untuk membeli gas. Berbeda dengan para pemula, mereka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk beralih ke gas, karena masih merasa takut. Akan tetapi seiring berjalannya waktu dan dengan melihat tetangga mereka yang telah menggunakan kompor gas untuk memasak ternyata lebih cepat dan aman digunakan, selain itu harga minyak tanah yang semakin naik dan semakin langka, secara perlahan mereka pun beralih ke gas. Berikut ini tabel yang menjelaskan jawaban masyarakat tentang keefisienan penggunaan gas.

Tabel IV.6
Jawaban Responden Tentang Apakah Pemakaian Gas LPG Efisien Menurut Anda

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	a. Ya	45	86,54
2	b. Kurang Efisien	7	13,46
3	c. Tidak Efisien	0	0
Jumlah		52	100

Sumber: Data Olahan Angket

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 45 responden atau 86,54% menjawab gas LPG lebih efisien dan mudah dibanding minyak tanah, sedangkan 7 responden atau 13,46% menjawab kurang efisien, dan yang menjawab tidak efisien tidak ada atau 0%. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat sudah mengetahui bahwa gas lebih efisien dibandingkan minyak tanah.

Berikut ini tabel tentang dampak pemakaian LPG terhadap pengeluaran masyarakat:

Tabel IV.7
Jawaban Responden Tentang Bagaimana Dampak Pemakaian LPG Terhadap Pengeluaran Anda

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	a. Lebih Hemat	36	69,23
2	b. Sama Saja	16	30,77
3	c. Lebih Boros	0	0
Jumlah		52	100

Sumber: Data Olahan Angket

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 36 responden atau 69,23% menjawab bahwa pemakaian LPG berdampak positif, karena bisa menghemat pengeluaran, sedangkan 16 responden atau 30,77% menganggap bahwa

pemakaian LPG tidak berpengaruh terhadap besarnya pengeluaran. Sedangkan dampak terhadap kehidupan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.8
Jawaban Responden Tentang Bagaimana Dampak Kebijakan *Konversi* Minyak Tanah ke LPG Terhadap Kehidupan Anda

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	a. Lebih Mudah	32	61,54
2	b. Biasa Saja	13	25,00
3	c. Lebih susah	7	13,46
Jumlah		52	100

Sumber: Data Olahan Angket

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 32 responden atau 61,54% menjawab bahwa kebijakan *konversi* minyak tanah ke LPG memberi dampak dalam kehidupan menjadi lebih mudah, sedangkan 13 responden atau 25% menjawab biasa saja, dan 7 responden atau 13,46% menjawab lebih susah dengan alasan dengan adanya *konversi* minyak tanah menjadi mahal dan langka, sedangkan mereka masih memerlukan untuk memasak dan penerangan apabila mati lampu. Jadi diharapkan agar pemerintah tidak menghentikan pasokan minyak tanah bersubsidi, karena walau bagaimanapun masyarakat masih membutuhkan minyak tanah untuk keperluan lain demi kelangsungan hidup mereka.

Dari hasil wawancara dan angket diatas, dapat kita ketahui bahwa pemahaman masyarakat tentang *konversi* minyak tanah ke LPG sudah baik. Hal ini ditunjang dengan pemahaman masyarakat akan pentingnya kebijakan *konversi* minyak tanah ke tabung LPG. Selain itu kebijakan ini juga berdampak positif bagi kehidupan masyarakat, karena bisa menghemat pengeluaran dan kehidupan masyarakat mejadi lebih mudah. Akan tetapi masih ada sebagian masyarakat yang masih takut dan enggan beralih ke LPG karena takut jika terjadi ledakan tabung gas seperti

pemberitaan yang marak disiarkan oleh stasiun televisi. Dari pemahaman akan kebijakan *konversi* minyak tanah ke tabung LPG yang telah diadopsi saat ini juga memudahkan pemerintah dalam memahami masyarakat bagaimana maksud dan tujuan *konversi* ini.

Kesesuaian antara teori dengan kenyataan adalah bahwa kebijakan merupakan ketetapan yang berlaku dan mengandung prinsip-prinsip dan dilakukan secara konsisten. Ini pula yang saat ini dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah selaku pemberi kebijakan memberlakukan dan mengarahkan, sedangkan masyarakat sebagai objek melaksanakan kebijakan tersebut secara konsisten.

Dan dari kebijakan yang telah dilakukan pemerintah tentang *konversi* minyak tanah ke tabung LPG merupakan usaha untuk membangun kesejahteraan warga menjadi lebih baik. Selain karena semakin menipisnya sumber daya alam minyak tanah di negara kita agar masyarakat kita menjadi lebih baik lagi dalam kehidupan rumah tangga. Karena seperti yang kita ketahui penggunaan LPG lebih efektif dan lebih mudah ditemui saat ini.

B. Upaya Pemerintah Dalam Sosialisasi *Konversi* Minyak Tanah ke LPG

Sosialisasi merupakan hal terpenting dalam mencapai keberhasilan program yang telah direncanakan. Begitu pula dalam hal *konversi* minyak tanah ke LPG, maka sosialisasi dari pemerintah sangat menentukan tingkat keberhasilan program tersebut. Berikut ini adalah tanggapan masyarakat Desa Buatan Baru terhadap sosialisasi *konversi* minyak tanah ke LPG dari pemerintah setempat:

Tabel IV.9

Jawaban Responden Tentang Bagaimana Pendapat Anda Terhadap Sosialisasi Yang Telah Dilakukan Oleh Pemerintah Setempat

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	a. Baik	25	48,08
2	b. Cukup	18	34,61
3	c. Kurang	9	17,31
Jumlah		52	100

Sumber: Data Olahan Angket

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 25 responden atau 48,08% menjawab bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah tentang pemakaian LPG yang benar sudah baik, sedangkan 18 responden atau 34,61% menjawab cukup, dan 9 responden atau 17,31% menjawab kurang.

Dari wawancara yang penulis lakukan bahwa pemerintah desa telah melakukan sosialisasi tentang tata cara pemakaian kompor gas yang benar dan aman dengan cara dipraktekkan secara langsung di lapangan. Akan tetapi masih ada juga warga yang tidak tahu tentang sosialisasi tersebut, padahal pemerintah setempat telah memberitahukan kepada warga sebelum melakukan sosialisasi tersebut. Berikut ini tabel tentang bentuk sosialisasi yang dilakukan pemerintah:

Tabel IV.10

Jawaban Responden Tentang Apa Saja Bentuk Sosialisasi Yang Telah Dilakukan Oleh Pemerintah Setempat

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	a. Pelatihan cara penggunaan	52	100
2	b. Pengontrolan	0	0
Jumlah		52	100

Sumber: Data Olahan Angket

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masyarakat yang menjawab sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat yaitu pelatihan dengan cara

mempraktekkan penggunaan LPG ada 52 responden atau 100%, dan yang menjawab melalui pengawasan atau pengontrolan tidak ada. Dari hasil wawancara kepada perangkat desa menyatakan bahwa pada awalnya mempraktekkan cara penggunaan LPG, namun setelah itu mereka tetap melakukan pengawasan melalui RT/RW.

Meskipun telah dilakukan sosialisasi, namun masih ada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam pemakaian kompor gas yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.11
Jawaban Responden Tentang Apakah Ada Kesulitan Dalam Pemakaian Gas LPG

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	a. Ada	1	1,92
2	b. Kadang-kadang	33	63,46
3	c. Tidak Ada	18	34,62
Jumlah		52	100

Sumber: Data Olahan Angket

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masyarakat yang mengalami kesulitan dalam pemakaian LPG ada 1 responden atau 1,92%, sedangkan yang kadang-kadang mengalami kesulitan ada 33 responden atau 63,46% dan yang tidak mengalami kesulitan sama sekali ada 18 responden atau 34,62%. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang kadang-kadang mengalami kesulitan dalam pemakaian kompor gas, diantaranya pada saat mengganti tabung gas yang baru mereka tidak bisa memasang

regulatornya, kesulitan lain pada saat menghidupkan kompor gas, api tidak menyala dan harus menggoyang-goyang regulator atau selangnya.⁴

Di desa Buatan Baru terdapat dua pangkalan atau agen yang menyediakan tabung-tabung gas, pasokan gas disini juga tidak pernah telat, selain itu tercukupinya tabung-tabung subsidi dari pemerintah, sehingga masyarakat tidak akan kesulitan untuk mendapatkan gas.

Tabel IV.12

Jawaban Responden Tentang Apakah Ada Kunjungan atau Penjelasan Langsung dari Pihak Pertamina

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	a. Ada	24	46,15
2	b. Tidak Ada	28	53,85
Jumlah		52	100

Sumber: Data Olahan Angket

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masyarakat yang mendapat kunjungan dan penjelasan langsung dari pihak pertamina berjumlah 24 responden atau 46,15% dan yang tidak mendapat kunjungan ada 28 responden atau 53,85%. Hal ini karena pada saat ada kunjungan tersebut responden tidak berada dirumah. Selain itu tidak semua rumah yang dikunjungi oleh pertamina, hanya sebagian saja secara acak. Meskipun masyarakat tidak mendapat penjelasan dari pertamina namun mereka mendapat penjelasan dari sosialisasi pemerintah setempat dan pihak lain sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

⁴ Daryadin, (Kaur Pembangunan Desa Buatan Baru), *Wawancara*, Tanggal 13 Juni 2012.

Tabel IV.13

**Jawaban Responden Tentang Dari Mana Anda Mendapat Penjelasan
Tentang LPG**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	a. Sosialisasi pemerintah	34	65,38
2	b. Berita televisi	12	23,08
3	c. Media massa	6	11,54
Jumlah		52	100

Sumber: Data Olahan Angket

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masyarakat yang mendapat penjelasan tentang LPG melalui sosialisasi dari pemerintah ada 34 responden atau 65,38%, dan yang melalui berita dari televisi ada 12 responden atau 23,08%, sedangkan yang melalui media massa ada 6 responden atau 11,54%.

Berikut ini tabel tentang media informasi yang didapatkan oleh masyarakat tentang LPG:

Tabel IV.14

**Jawaban Responden Tentang Apa Saja Media Informasi yang Anda
Dapatkan Tentang LPG**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	a. Pelatihan	28	53,85
2	b. Kunjungan pertamina	24	46,15
3	c. Teknisi	0	0
Jumlah		52	100

Sumber: Data Olahan Angket

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masyarakat yang mendapat pengetahuan melalui media pelatihan ada 28 responden atau 53,85%, dan yang mendapat pengetahuan melalui kunjungan dari pertamina ada 24 responden atau 46,15%, sedangkan yang melalui teknisi tidak ada.

Dari sosialisasi-sosialisasi yang telah masyarakat dapatkan, maka dapat diketahui tingkat pemahaman masyarakat tentang penggunaan LPG dalam tabel berikut:

Tabel IV.15

Jawaban Responden Tentang Apakah Anda Memahami Secara Jelas Penggunaan LPG

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	a. Paham	25	48,08
2	b. Belum paham	17	32,69
3	c. Tidak paham	10	19,23
Jumlah		52	100

Sumber: Data Olahan Angket

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masyarakat yang telah memahami cara penggunaan LPG ada 25 reponden atau 48,08%, dan yang belum memahami ada 17 responden atau 32,69%, sedangkan yang tidak memahami ada 10 responden atau 19,23%.

Tabel IV.16

Jawaban Responden Tentang Apakah Anda Memahami Resiko-resiko yang Mungkin Terjadi Dalam Penggunaan LPG

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	a. Paham	18	34,62
2	b. Belum paham	21	40,38
3	c. Tidak paham	13	25,00
Jumlah		52	100

Sumber: Data Olahan Angket

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masyarakat yang telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam penggunaan LPG ada 18 reponden atau 34,62%, dan yang belum memahami ada 21 responden atau 40,38%, sedangkan yang tidak memahami ada 13 responden atau 25,00%.

Tabel IV.17

**Jawaban Responden Tentang Apakah Anda Memahami Cara
Penanggulangan Apabila Terjadi Resiko Dalam Penggunaan LPG**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	a. Paham	18	34,62
2	b. Belum paham	21	40,38
3	c. Tidak paham	13	25,00
Jumlah		52	100

Sumber: Data Olahan Angket

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masyarakat yang telah memahami cara penanggulangan apabila terjadi resiko dalam penggunaan LPG ada 18 reponden atau 34,62%, dan yang belum memahami ada 21 responden atau 40,38%, sedangkan yang tidak memahami ada 13 responden atau 25,00%.

Dalam wawancara yang dilakukan terkait dengan pembahasan Upaya Pemerintah Dalam Sosialisasi *Konversi* Minyak Tanah Ke LPG yang dilakukan pada tanggal 13 Juni 2012 dengan Bapak Nana Rukmana selaku Kepala Desa Buatan Baru Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, diperoleh informasi sebagai berikut:

“Untuk sosialisasi yang dilakukan pemerintah sangat diharapkan lebih gencar lagi dalam hal ini. Karena terlihat pemerintah kurang serius dengan kebijakan ini. Padahal kebijakan ini tidak hanya berlaku setahun dua tahun tetapi selamanya. Di desa Buatan Baru tidak ada kendala dalam perubahan ini. Semuanya masih bisa menerima, dan kami para perangkat desa terus memantau hal ini di setiap warga kami melalui RT. Agen-agen penjual LPG juga tidak terlalu jauh dari warga, sehingga mereka bisa mudah mendapatkannya. Kita juga menyarankan kepada setiap kepala keluarga untuk mengajari atau membantu saudara-saudara kita yang lanjut usia di rumah kita. Supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan.”⁵

Pernyataan ini juga diperkuat oleh pendapat Bapak Wiyadi selaku Sekretaris Desa Buatan Baru Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, yaitu:

⁵ Nana Rukmana, (Kepala Desa Buatan Baru), *Wawancara*, Tanggal 13 Juni 2012.

“Harusnya pemerintah lebih serius untuk melakukan sosialisasi. Terutama di daerah-daerah yang masih terpencil. Selain itu sosialisasi dari pihak Pertamina sangat dibutuhkan untuk menjelaskan bagaimana pencegahan agar tidak terjadi ledakan-ledakan seperti di berita-berita. Saya juga menyarankan agar pemerintah tidak menghentikan distribusi minyak tanah ke daerah-daerah, termasuk daerah kami, supaya rakyat yang memilih dan menentukan apa yang baik buat mereka dan tentunya dengan harga yang tidak terlalu tinggi seperti yang ada sekarang ini. Syukur dari awal sosialisasi *konversi* minyak tanah ke LPG ini warga di desa Buatan Baru ini menanggapinya dengan baik dan kami bisa memberikan penyuluhan dan menyebarkan tabung dan kompor LPG ke setiap kepala keluarga dengan baik dan benar. Kendalanya akhir-akhir ini berita di media massa mengagetkan warga kami dengan terjadinya ledakan tabung LPG di daerah-daerah. Kejadian-kejadian itu membuat warga kami takut untuk tetap menggunakan LPG. Dan kami harap apa yang kami usahakan untuk warga kami berjalan baik tanpa insiden seperti apa yang sedang ramai dibicarakan tentang LPG di negara kita.”⁶

Menganalisis dari hasil angket dan wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa pemerintah setempat telah melakukan sosialisasi tentang pemakaian kompor gas yang baik dan benar kepada masyarakat, selain itu juga bisa diketahui apa saja kendala yang warga alami dalam penggunaan LPG. Namun masih terdapat warga yang menyayangkan akan ketidakseriusan pemerintah dalam sosialisasi kebijakan konversi minyak tanah ke LPG. Tingkat pemahaman masyarakat tentang cara penggunaan, resiko-resiko yang mungkin terjadi dan cara penanggulangan resiko juga masih rendah. Dengan demikian masih sangat diperlukan sosialisasi secara kontinyu agar masyarakat dapat memahami secara baik. Untuk itu pemerintah juga harus membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Hal ini sangat penting karena komunikasi dapat mempengaruhi pemasaran LPG kepada masyarakat.

⁶ Wiyadi, (Sekretaris Desa Buatan Baru), *Wawancara*, Tanggal 13 Juni 2012.

Komunikasi pemasaran adalah semua elemen-elemen promosi dari *marketing mix* yang melibatkan komunikasi antar organisasi dan target *audience* pada segala bentuknya yang ditujukan untuk *performance* pemasaran.⁷

Tjiptono menuturkan komunikasi pemasaran adalah suatu aktifitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi/ membujuk, dan atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.⁸

Jadi selain mensosialisasikan bagaimana kebijakan *konversi* minyak tanah ke LPG hendaknya pemerintah juga memberikan pengetahuan sebenarnya apa itu LPG. Karena dari wawancara tersebut juga banyak warga yang mengeluhkan tentang maraknya ledakan yang terjadi akibat penggunaan LPG. Sudah seharusnya pemerintah juga menyampaikan bagaimana pemeliharaan, penggunaan dan pencegahan LPG agar tidak terjadi kecelakaan seperti yang banyak diberitakan di televisi atau media massa.

Dengan komunikasi pemasaran yang baik juga dapat menghasilkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, yang dampak panjangnya masyarakat tidak akan ragu lagi untuk mengikuti kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan diberikan kepada masyarakat. Selain itu juga loyalitas masyarakat akan peraturan-peraturan pemerintah juga akan terbangun seiring kepercayaan masyarakat yang meningkat kepada pemerintah.

⁷ Ilham Prisgunanto, *Komunikasi Pemasaran Strategi dan Taktik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h.8.

⁸ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), edisi ke-3, h.219.

Strategi pemasaran merupakan pernyataan baik secara *implisit* maupun *eksplisit* mengenai bagaimana suatu merk atau lini produk mencapai tujuannya.⁹

Selain itu adanya strategi pemasaran yang baik dari pemerintah juga merupakan hal terpenting yang harus dilakukan pemerintah selain komunikasi pemasaran. Karena strategi pemasaran dapat memberikan arah kepada pemerintah bagaimana mengatur dan menentukan sikap terkait kebijakan *konversi* minyak tanah ke LPG. Selanjutnya pemerintah dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan kapan harus dilakukan terkait dengan bagaimana sosialisasi dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Selain itu juga akan tersampaikan bagaimana maksud dan tujuan kebijakan yang diberikan dan masyarakat dapat menerima sesuai keinginan pemerintah.

C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kebijakan *Konversi* Minyak Tanah ke LPG

Efisiensi dan efektivitas merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah, yang dalam ajaran Islam dipandu oleh kaidah-kaidah syar'iyah dan penentuan skala prioritas.¹⁰ Prinsip Islam tentang kebijakan Islam dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama.¹¹

⁹ *Ibid.*, h.6.

¹⁰ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.223.

¹¹ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h.230.

Kebijakan pemerintah terhadap program *konversi* minyak tanah ke LPG, yaitu terkait dengan program pengurangan subsidi energi, baik listrik maupun bahan bakar minyak, dengan alasan besarnya APBN untuk subsidi minyak tanah. Kondisi ini diperparah dengan makin melambungnya harga minyak dunia. Karena itu, pemerintah melakukan *konversi* minyak tanah ke LPG untuk mengatasi rancunya pengembangan dan pemanfaatan energi, sekaligus mengurangi tekanan masyarakat.

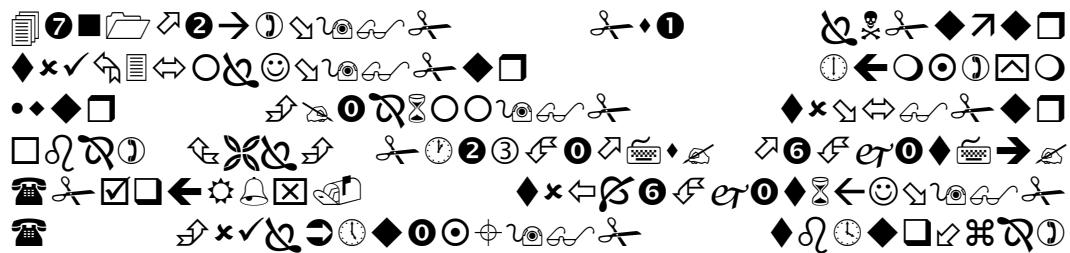
Langkah pemerintah melaksanakan kebijakan *konversi* minyak tanah ke LPG telah sesuai dengan kaidah hukum Islam karena bertujuan untuk kemaslahatan rakyat.

Sebagaimana dalam kaidah ushul fiqih berikut:

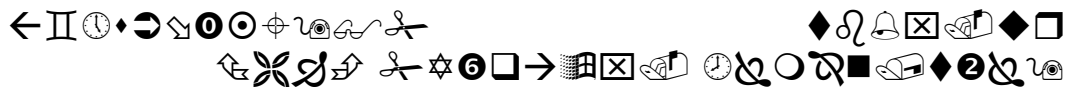
تصرف الإمام على الرعية منوط بالـ

“kebijakan imam (pemimpin) terhadap rakyatnya itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan”¹²

Tujuan selain untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat yaitu untuk menghemat APBN dan mengurangi subsidi minyak tanah, hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang memerintahkan untuk hemat dan tidak boros, sebagaimana firman Allah berikut:



¹² Imam Musbikin, *Qawaid Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h.124.



Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. (QS. Al- Israa’(17): 26-27)¹³

Dari uraian-uraian diatas maka kebijakan konversi minyak tanah ke LPG tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan telah sesuai dengan kaidah hukum Islam bahwasanya kebijakan yang diambil oleh pemerintah haruslah bertujuan untuk kemaslahatan rakyatnya dan juga untuk menghemat APBN. Selain itu pemerintah juga menggunakan undang-undang sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Pemerintah juga telah menunjuk pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam hal sosialisasi kepada masyarakat.

Program *konversi* minyak tanah ke LPG mendapat tanggapan baik dari masyarakat Desa Buatan Baru, sebagaian masyarakatnya pun telah beralih menggunakan gas sebagai bahan bakar memasak. Masyarakat menerima dan mengikuti apa yang telah menjadi kebijakan pemerintah, karena program tersebut juga menguntungkan bagi masyarakat. Sebagaimana firman allah dalam Surat an-Nisaa’ ayat 59:



¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h.257.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisaa’ (4): 59)¹⁴

Dalam ayat tersebut diterangkan bahwa kita sebagai orang yang beriman diperintahkan untuk mentaati Allah, Rasul dan *ulil amri* atau pemerintah. Dalam hal mentaati pemerintah maka kita harus mendukung program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah, salah satunya kebijakan *konversi* minyak tanah ke LPG, karena tujuan program tersebut selain untuk mengurangi subsidi BBM juga untuk kemaslahatan rakyat.

Adapun dampak *konversi* terhadap kehidupan masyarakat, dari hasil angket dapat diketahui bahwa kehidupan masyarakat menjadi lebih mudah, dari sisi pengeluarannya juga lebih hemat jika dibandingkan menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar, dengan demikian *konversi* minyak tanah ke LPG memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Hal ini telah sesuai dengan landasan kebijakan yang bertujuan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran masyarakat, mereka masih merasa takut jika sewaktu-waktu tabung gas tersebut akan meledak sebagaimana maraknya pemberitaan tentang meledaknya tabung gas ukuran 3 Kg.

Dari sisi sosialisasi penggunaan kompor gas yang aman dan benar telah dilakukan oleh pemerintah setempat, akan tetapi masih banyak warga yang

¹⁴ *Ibid.*, h.80.

menyayangkan ketidakseriusan pemerintah dalam hal sosialisasi. Masih banyak warga yang menganggap LPG kurang aman digunakan. Penulis juga berpendapat perlunya dilakukan lagi sosialisasi lanjutan yang melibatkan perempuan yang notabene menjadi pengguna utama LPG. Dari hasil angket yang penulis dapatkan juga terlihat jelas bahwa pemahaman masyarakat terhadap resiko-resiko yang kemungkinan bisa terjadi dalam penggunaan LPG dan cara penanggulangan resiko tersebut juga masih rendah, kunjungan dari Pertamina juga belum merata ke semua rumah, hanya beberapa rumah saja yang mendapat kunjungan. Untuk itu diharapkan agar pihak Pertamina lebih serius lagi menjalankan tugasnya, selain itu pemerintah desa juga harus tetap melakukan pengawasan dan menampung semua keluhan masyarakat terkait penggunaan LPG, agar program kebijakan ini bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah.

Islam juga memberikan tugas kepada setiap pemimpin untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah harus bertanggung jawab untuk memberikan sumber kehidupan bagi setiap penduduk negeri demi terciptanya keadilan sosial.

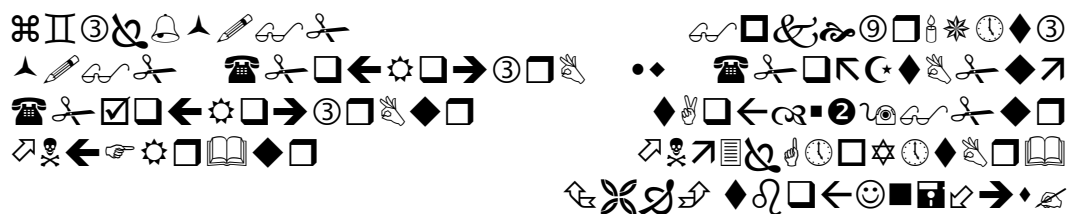
Adanya program *konversi* minyak tanah ke LPG membawa dampak positif terhadap kehidupan rakyat, dimana pengeluaran masyarakat menjadi berkurang setelah menggunakan LPG. Untuk itu diharapkan sosialisasi yang baik dan benar dari pemerintah agar masyarakat menjadi lebih mantap dan tidak merasa takut lagi untuk menggunakan LPG.

Dalam Islam interaksi sosial yang baik meliputi beberapa prinsip berikut:

1. Kejujuran

Kejujuran merupakan sifat utama yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin, karena sifat ini akan melahirkan kepercayaan publik (rakyat), dan sosialisasi kebijakan akan berjalan lancar. Diri Rasulullah merupakan contoh ideal yang berpegang teguh pada nilai-nilai kejujuran semenjak kecil, sehingga beliau mendapat julukan ‘*al-Amin*’. Dengan adanya kejujuran dalam setiap upaya sosialisasi, akan memperkaya wawasan rakyat tentang informasi yang akurat terkait dengan kebijakan atau program yang akan dijalankan pemerintah.¹⁵

Sikap jujur akan terlihat dalam kemampuan menjalankan amanah-amanah yang diberikan. Orang yang jujur sudah pasti amanah dalam setiap kepercayaan yang diberikan kepadanya. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al-Anfal ayat 27:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. (QS. Al-Anfal (8): 27)¹⁶

Dari ayat diatas jelas disebutkan bahwa kita tidak boleh mengkhianati amanat dan harus menjalankannya dengan baik, begitu pula dalam sosialisasi penggunaan LPG maka pemerintah dan pihak-pihak yang telah ditunjuk sebagai petugas sosialisasi harus melaksanakan tugasnya dengan baik agar program

¹⁵ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.162.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Op.cit*, h.163.

kebijakan ini berjalan dengan lancar dan masyarakat tidak ragu lagi menggunakan LPG.

2. Transparansi

Transparansi merupakan *derivasi* dari adanya kejujuran dalam melakukan sosialisasi kebijakan kepada rakyat. Dengan adanya transparansi akan meningkatkan hubungan publik dan ikatan emosional antara rakyat dan pemerintah. Tidak seperti kondisi pemerintahan saat ini yang cenderung menutup diri, merahasiakan kebobrokan, dan menutup mata terhadap keluhan dan beban hidup rakyat dengan sikap arogan.¹⁷

Transparansi mempunyai banyak kegunaan, salah satunya dapat menutup celah-celah penyelewengan serta akan adanya kejujuran dalam pengelolaan negara. Menurut Affan Ghaffar, untuk menciptakan pemerintah yang bersih, paling tidak ada beberapa hal yang dituntut transparan, yakni: penetapan posisi, jabatan dan kedudukan, kekayaan pejabat publik, pemberian penghargaan, penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan, kesehatan, moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik, keamanan dan ketertiban, dan kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat.¹⁸

Begitu pula dalam hal kebijakan *konversi* minyak tanah ke LPG, maka pemerintah harus transparan dalam melakukan sosialisasi, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, pemerintah harus memberikan penjelasan dengan baik tentang alasan, maksud dan tujuan dilakukan konversi serta memberikan pengajaran

¹⁷ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Op.cit*, h.163.

¹⁸ M. Ihsan, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h.111.

tentang tata cara penggunaan LPG yang baik dan benar agar rakyat dapat memahaminya dengan baik pula.

3. Responsif terhadap aspirasi rakyat

Setiap keputusan dan kebijakan yang diambil seorang pemimpin harus disampaikan dan dijelaskan kepada rakyat, sehingga mereka akan tenang dan tentram dalam kehidupan. Sehingga tidak menimbulkan protes, demonstrasi atau tuntutan kepada pemimpin.¹⁹

Terkait dengan azas responsif ini, pemerintah harus terus merumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial terhadap semua kelompok sosial dalam karakteristik kulturnya. Dalam upaya mewujudkan azas responsif pemerintah harus melakukan upaya-upaya strategis dalam memberikan perlakuan yang humanis pada kelompok-kelompok masyarakat tanpa pandang bulu.²⁰

Kisah Rasulullah bersama kaum Anshar memberikan indikasi yang jelas tentang tindakan responsif Rasulullah terhadap tuntutan dan keluhan dari kaum Anshar, seraya menjelaskan sebab pembagian harta *fa'i* kepada kaum Quraisy. Akhirnya kaum Anshar kembali dengan tenang dan bahagia.

Pemerintah sudah seharusnya responsif terhadap aspirasi ataupun keluhan rakyatnya, jangan menunggu mereka menyampaikan keinginan-keinginannya itu, tetapi mereka secara proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan mereka, untuk kemudian melahirkan berbagai kebijakan strategis guna memenuhi kepentingan umum tersebut.

¹⁹ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Op.cit*, h.166.

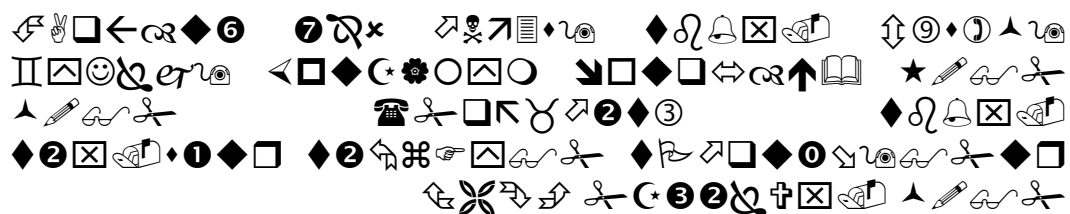
²⁰ M. Ihsan, *Op.cit.*, h.115.

Begitu juga dengan kebijakan *konversi* minyak tanah ke LPG, maka pemerintah harus merespon keluhan masyarakat seperti maraknya pemberitaan meledaknya tabung gas ukuran 3 kg yang membuat masyarakat menjadi takut dan ragu untuk menggunakan LPG. Maka pemerintah harus menjelaskan apa yang menyebabkan meledaknya tabung gas tersebut. Pemerintah juga harus mengambil tindakan agar distribusi gas ke masyarakat telah aman dan sesuai dengan SNI.

4. Suri tauladan

Suri tauladan merupakan media komunikasi yang efektif guna memopulerkan sebuah pemikiran atau produk baru, tanpa harus mengeluarkan tenaga ekstra. Hal ini dikarenakan masyarakat cenderung untuk mengikuti seorang figur yang memberikan teladan dan panutan dalam kehidupan mereka, baik untuk memakai atau meninggalkan sesuatu. Jika para pemimpin memberikan contoh perilaku yang baik, maka hal ini akan memberikan pengaruh positif terhadap sikap dan perilaku masyarakat.²¹

Rasulullah dijadikan sebagai panutan dan teladan bagi para sahabat, hal ini dikarenakan beliau memiliki akhlak yang mulia, sebagaimana yang digambarkan dalam firman Allah SWT surat Al-Ahzab ayat 21:



Artinya: “*Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan*

²¹ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Op.cit*, h.168.

(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”. (QS. Al-Ahzab (33): 21)²²

Begitu juga kaitannya dengan sosialisasi *konversi* minyak tanah ke LPG, maka pemerintah harus menjadi suri tauladan yang baik dengan cara memberikan penjelasan dan mencontohkan secara langsung tata cara penggunaan LPG yang benar dan aman, selain itu juga harus menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan LPG, seperti resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam penggunaan LPG, cara penanggulangan resiko, dan lain sebagainya. Namun dari hasil angket yang penulis lakukan, tingkat pemahaman masyarakat tentang hal tersebut masih kurang. Sehingga masih diperlukan sosialisasi yang lebih baik lagi. Dalam hal ini pemerintah belum bisa menjadi suri tauladan yang baik bagi rakyatnya.

Kebijakan *konversi* minyak tanah ke LPG jika terlaksana dengan baik, maka akan terwujud pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keadaan ekonomi yang stabil, menekan tingkat *inflasi*, pemerataan dan keadilan pembangunan.

²² Departemen Agama RI, *Op.cit*, h.379.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat Desa Buatan Baru terhadap *konversi* minyak tanah ke LPG sudah baik. Hal ini ditunjang dengan pemahaman mereka akan pentingnya kebijakan *konversi* minyak tanah ke LPG. Selain itu kebijakan ini juga berdampak positif bagi kehidupan masyarakat, karena bisa menghemat pengeluaran dan kehidupan masyarakat menjadi lebih mudah karena penggunaan LPG lebih efektif dan lebih mudah ditemui saat ini. Akan tetapi masyarakat masih takut dan khawatir apabila terjadi ledakan tabung gas.
2. Upaya pemerintah dalam hal sosialisasi konversi minyak tanah ke LPG telah dilakukan, namun masih belum maksimal karena ada sebagian masyarakat yang belum memahami cara pemakaian LPG, resiko-resiko yang mungkin terjadi, dan cara penanggulangan resiko tersebut.
3. Tinjauan ekonomi Islam terhadap kebijakan *konversi* minyak tanah ke LPG tidak bertentangan dan telah sesuai dengan kaidah hukum Islam, karena kebijakan ini bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat dan menghemat APBN. Selain itu kebijakan ini berdampak positif bagi kehidupan masyarakat. Akan tetapi dari segi sosialisasinya masih belum maksimal

sesuai dengan prinsip Islam yang meliputi kejujuran, transparansi, responsif terhadap aspirasi rakyat dan suri tauladan.

B. Saran

Saran-saran yang diajukan kepada pemerintah dalam kaitannya membuat kebijakan *konversi* minyak tanah ke LPG adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah agar lebih menekankan lagi seberapa penting tujuan kebijakan *konversi* minyak tanah ke LPG. Selain itu pemerintah juga perlu menjelaskan bagaimana tujuan jangka pendek maupun jangka panjang serta manfaat dari kebijakan *konversi* ini. Untuk itu tidak ada salahnya pemerintah mengkaji ulang bagaimana memberikan cara baru yang efektif guna keberhasilan *konversi* minyak tanah ke LPG. Berita tentang banyaknya kasus ledakan LPG merupakan ancaman bagi masyarakat. Untuk itu bagaimana kualitas LPG yang saat ini maupun yang akan beredar akan sangat lebih baik diperiksa kembali. Selain itu ketika sosialisasi berlangsung hendaknya pemerintah juga memberikan cara-cara agar kecelakaan tidak berlangsung. Kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat yang baik akan menghasilkan kesuksesan dari kebijakan ini.
2. Sosialisasi yang telah dilakukan untuk lebih ditingkatkan. Akan lebih baik lagi ketika melakukan sosialisasi pemerintah terjun langsung ke lapangan. Selain itu ketika dilakukan sosialisasi secara langsung pemerintah juga melibatkan warga setempat untuk turut aktif mensukseskan kebijakan *konversi* minyak tanah ke LPG.

3. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah sudah seharusnya dilakukan untuk kemaslahatan dan kepentingan masyarakat. Dalam mensosialisasikan kebijakan akan lebih baik jika dilakukan sesuai prinsip dan nilai yang telah diterapkan oleh Rasul dan para sahabat yang meliputi kejujuran, transparansi, responsif terhadap aspirasi rakyat, dan suri tauladan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab, Solichin, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Abu Sinn ,Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Al Arif, M. Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Al-Imam Al-‘Alamah Al-Mujtahid Jalaluddin As-Suyuti Asy-Syafi’i, *Al-Asybah Wa An-Nadhoir Fi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, Al-Maktab Al-Thaqafy: 2007.
- Al-Zarqa, Musthafa Ahmad, *Hukum Islam dan Perbuatan Sosial Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqh*, Jakarta: Riora Cipta, 2000.
- Amalia, Euis, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2005.
- Djazuli, H.A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Edwin Nasution, Mustafa, *Pengenalan Eksekutif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Gilarso, T, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- Karim, Adiwarman, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Kumorotomo, Wahyudi, *Desentralisasi Fiskal*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mannan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

Mujahidin, Akhmad, *Buku Ajar Ekonomi Islam II*, Pekanbaru: Suska Press, 2010.

Musbikin, Imam, *Qawaid Al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

M. Ihsan, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.

Nugroho, Riant, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: PT Gramedia, 2004.

Prisgunanto, Ilham, *Komunikasi Pemasaran Strategi dan Taktik*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.

Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1997.

Rahardja, Prathama, dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.

Stanton, William J & Y Lamarto, *Prinsip Pemasaran*, Jakarta: Erlangga, 1984.

Sukirno, Sadono, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Suparmoko, M, dan Maria R. Suparmoko, *Pokok-Pokok Ekonomika*, Yogyakarta: BPFE, 2000.

Tjiptono, Fandy, *Strategi Pemasaran edisi ke-3*, Yogyakarta: Andi Offset, 2008.

<http://gasdom.pertamina.com/faq.aspx>.

<http://tutorjunior.blogspot.com/2009/10/kontroversi-pembagian-tabunggas.html>.

<http://wahyubudiutami.blogspot.com/2012/01/tujuan-dan-kebijakan-ekonomi.html>

<http://www.pertamina.com/konversi/faq.php>